LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON





KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Instansi Pemerintah se-Kabupaten Buton, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2024.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2024 didalamnya memuat informasi kinerja Pemerintah Kabupaten Buton dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buton Tahun 2023-2026.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2024 dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Buton yaitu **'TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDUSTRI DAN BERBUDAYA DI KABUPATEN BUTON TAHUN 2025".**

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian laporan ini khususnya Stakeholder dan OPD yang menyampaikan hasil capaian sasaran dan indikator kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2024. Semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja serta memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Pasarwajo, 25 Maret 2025

BUPATI BUTON,

ALVIN AKAWIJAYA PUTRA, SH

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu kewajiban pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kabupaten Buton.

Laporan Kinerja ini mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buton Tahun 2023-2026. Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti-bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Buton yang telah ditetapkan tahun 2024, sesuai dengan RPD.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 27 indikator kinerja utama Bupati tahun 2024, disimpulkan bahwa terdapat 17 (Tujuh Belas) capaian indikator sasaran atau sebanyak 62,96% masuk dalam kategori Sangat Tinggi, 5 (Lima) Indikator sasaran atau sebesar 18,51% masuk dalam kategori tinggi, 1 (satu) Indikator sasaran atau sebesar 3,70% masuk dalam kategori sedang, namun ada 1 (satu) indikator sasaran atau 3,70% yang masuk dalam kategori rendah, bahkan ada 3 (tiga) indikator sasaran atau 11,11% masuk kriteria sangat rendah.

IKU yang masuk kriteria Sangat Tinggi, yaitu indikator yang pencapaiannya ≥91% meliputi: Indeks kualitas air, Indeks kualitas udara, Indeks kualitas udara, Indeks kualitas tutupan tanah, Angka harapan lama sekolah, Rata-rata lama sekolah,

Angka harapan hidup, Pendapatan perkapita, Pengeluaran perkapita, Gini ratio, Tingkat pengangguran terbuka, Kategori kabupaten layak anak, Indeks pembangunan gender, Opini BPK, Indeks kepuasan masyarakat, Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan, Indeks infrastruktur wilayah, dan Rasio elektrifikasi.

IKU yang masuk kriteria Tinggi yaitu indikator yang pencapaiannya berada pada skala 76 < 90 meliputi : Laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, Angka Kemiskinan, Nilai Sakip kabupaten Persentase penyelesaian tindak kejahatan, dan Persentase Indeks Desa Membangun (Berkembang).

IKU yang masuk kriteria sedang yaitu indikator yang pencapaiannya berada pada skala 66 < 75 yaitu Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Sementara yang pencapaiannya berada pada skala 51<65 dan masuk pada kriteria rendah adalah Persentase Ormas Aktif dan 3 (tiga) Indikator yang masuk pada kriteria sangat rendah dengan capaian <50 meliputi Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan penggalian, Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan, dan Persentase cabang olahraga yang terseleksi mengikuti event olahraga daerah, regional dan nasional. Dengan demikian masih terdapat indikator sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan dari setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Buton ke depan. Walaupun sebagian besar IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Buton dengan berbagai unsur baik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tenggara, dan daerah-daerah lain maupun juga dengan pihak-pihak di luar pemerintah.

Tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab. Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh OPD di lingkungan Kabupaten Buton untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang, utamanya dalam rangka memberikan peningkatan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
IKHTISAR EKSEKUTIF ii
DAFTAR GAMBAR vi
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GRAFIK vi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Maksud dan Tujuan 2
C. Dasar Hukum 3
D. Gambaran Umum 4
1. Kondisi Geografis 4
2. Kondisi Topografi 6
3. Kondisi Demografi 6
4. Kondisi Perekonomian Daerah 8
E. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 11
F. Sumber Daya Manusia Aparatur 14
G. Isu Strategis 15
H. Sistematika Penyajian 25
BAB II 26
PERENCANAAN KINERJA 26
A. Perencanaan Strategis 26
1. Visi 26
2. Misi 27
3. Tujuan dan Sasaran 30
4. Strategi dan Arah Kebijakan 45
B. Perjanjian Kinerja 56
BAB III 60
AKUNTABILITAS KINERJA 60
BAB IV 134
PENUTUP 134

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 - Peta Administrasi Kab.Buton 5
Gambar 2 - Komposisi Aparatur Kabupaten Buton Menurut Jenis Kelamin 14
Gambar 3 - Keterkaitan Antara Visi dengan Misi RPJPD.....30
Gambar 4 - Skema Visi, Misi dengan Perumusan Tujuan dan Sasaran, Program.....31

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 5
Tabel 1. 2 7
Tabel 1. 3 10
Tabel 1. 4 13
Tabel 2. 1 38
Tabel 2. 2 45
Tabel 2. 3 49
Tabel 2. 4 57
Tabel 3. 1 62
Tabel 3. 2 65
Tabel 3. 3 69
Tabel 3. 4 73
Tabel 3. 5 79
Tabel 3. 6 84
Tabel 3. 7 87
Tabel 3. 8 92
Tabel 3. 9 100
Tabel 3. 10 106
Tabel 3. 11 113
Tabel 3. 12 115
Tabel 3. 13 117
Tabel 3. 14 120
Tabel 3. 15 121
Tabel 3. 16 123
Tabel 3. 17 124
Tabel 3. 18 130

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 7
Grafik 1. 2 15
Grafik 3. 1 78
Grafik 3. 2 80
Grafik 3. 3 85
Grafik 3. 4 86
Grafik 3. 5 89
Grafik 3. 6 90
Grafik 3. 7 91
Grafik 3. 8 94
Grafik 3. 9 95
Grafik 3. 10 96
Grafik 3. 11 97
Grafik 3. 12 99
Grafik 3. 13 103
Grafik 3. 14 108
Grafik 3. 15 112
Grafik 3. 16 114

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, peningkatan pengawasan, tanggap, profesional, efisien dan efektif, transparan, pelaksanaan kesetaraan, berwawasan ke depan, mendorong partisipasi warga dan penegakan hukum, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan Kinerja Kabupaten Buton disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Buton.

Adapun Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

a. Menjadikan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;

b. Terwujudnya transparansi Instansi Pemerintah;
c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sementara Penyelenggaraan SAKIP itu sendiri meliputi, Rencana strategis, Perjanjian kinerja, Pengukuran kinerja, Pengelolaan data kinerja, Pelaporan kinerja, Reviu dan evaluasi kinerja.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengukuran secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja disebutkan bahwa Bupati menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah dilakukan dengan maksud untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang.

Sementara untuk tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton. Laporan Kinerja Pemerintah juga digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan penilaian terhadap kinerja pemerintah selama tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buton Tahun 2023-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2023-2026, sebagai bahan pengambilan kebijakan, serta penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif dan efisien pada tahun-tahun berikutnya.

C. Dasar Hukum

Pelaksanaan penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Buton tahun 2024 dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Bupati Buton Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2023-2026.

D. Gambaran Umum

Gambaran umum daerah meliputi paparan tentang kondisi geografis, gambaran umum demografis dan kondisi ekonomi Kabupaten Buton. Secara rinci mengenai hal-hal tersebut dipaparkan sebagai berikut :

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Buton terletak di jazirah tenggara Pulau Sulawesi dan bila ditinjau dari peta Provinsi Sulawesi Tenggara, secara geografis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan diantara 5,30 – 5,390 Lintang Selatan dan membentang dari barat ke timur diantara 122,80 – 123,130 Bujur Timur.

Kabupaten Buton di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Buton Utara, di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wakatobi dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Buton.

Kabupaten Buton memiliki wilayah daratan seluas ± 1.648,04 km2 dan wilayah perairan laut seluas ± 1.058,11 km2 , dimana pada tahun 2014 mengalami pemekaran menjadi 3 kabupaten yaitu Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Tengah, dan Kabupaten Buton Selatan. Sehingga kecamatan di Kabupaten Buton menjadi 7 kecamatan dengan luas wilayah masing-masing seperti tertera pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. 1
Luas Wilayah Kabupaten Buton dan Pemerintahan

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Desa	Kelurahan
1.	Lasalimu	319,65	14	1
2.	Lasalimu Selatan	147,01	16	0
3.	Siontapina	248,81	11	0
4.	Pasarwajo	300,97	13	9
5.	Wabula	65,27	7	0
6.	Wolowa	94,55	7	0
7.	Kapontori	471,77	15	2
	Jumlah	**1.648,04**	**83**	**12**

Sumber : BPS, Kabupaten Buton dalam Angka Tahun 2025

Gambar 1 - Peta Administrasi Kab.Buton



Sumber : BPS Kab.Buton Tahun 2024

2. Kondisi Topografi

Kondisi topografi tanah daerah Kabupaten Buton pada umumnya memiliki permukaan yang bergunung, bergelombang, dan berbukit-bukit. Diantara gunung dan bukit-bukit tersebut, terbentang daratan yang merupakan daerah-daerah potensial untuk pengembangan sektor pertanian. Permukaan tanah pegunungan relatif rendah, ada yang bisa digunakan untuk usaha yang sebagian besar be- rada pada ketinggian 100-500 M di atas permukaan laut (Mdpl), kemiringan tanah mencapai 400. Kabupaten Buton memiliki beberapa sungai besar yang terdapat dibeberapa kecamatan. Sungai-sungai tersebut pada umumnya memiliki potensi yang dapat dijadikan sumber tenaga, irigasi dan kebutuhan rumah, seperti sungai Winto dan Tondo di Kecamatan Pasarwajo, Sungai Malaoge, Tokulo, dan Sungai Wolowa di Kecamatan Lasalimu.

Jika dilihat dari sudut Oceanografi, Kabupaten Buton memiliki perairan laut yang masih luas, yang diperkirakan sekitar 21.054,69 Km2 (kondisi sebelum pemekaran 2014) Wilayah perairan tersebut sangat potensial untuk pengembangan usaha perikanan dan pengembangan wisata bahari, karena disamping hasil ikan dan hasil laut lainnya, juga memiliki panorama laut yang sangat indah. Peta lereng merupakan informasi tingkat kemiringan lereng yang terdapat pada suatu wilayah. Tingkat kemiringan lereng dinyatakan dalam persen atau derajat. Sebagian besar wilayah Kabupaten Buton (44,94%) berada pada kelas lereng 41%-60%. Wilayah yang berada pada lahan yang datar (lereng<2%) hanya mencapai 2,41% luas wilayah.

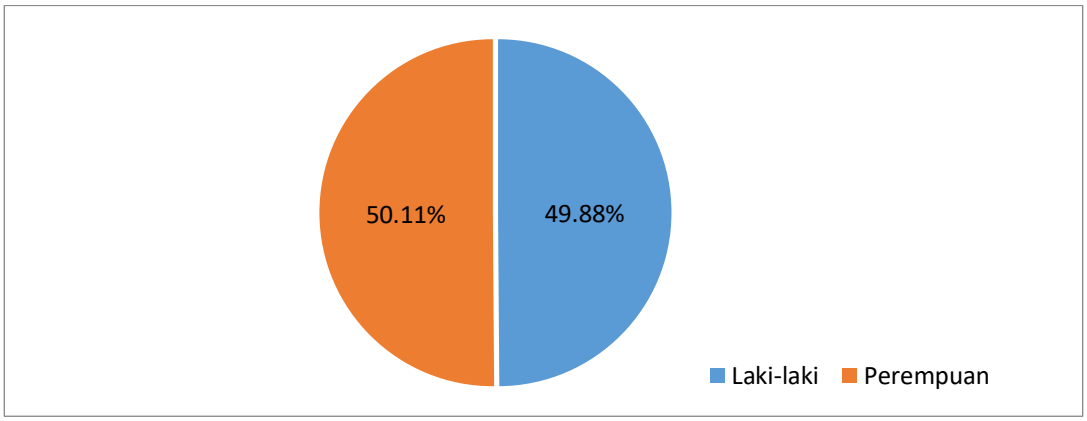
3. Kondisi Demografi

Secara demografi berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton, Jumlah penduduk Kabupaten Buton pada tahun 2024 sebanyak 122.024 jiwa, dengan komposisi laki-laki sebanyak 60.874 jiwa (49,88%) dan Perempuan 61.150 jiwa (50,11%) dengan kecamatan Pasarwajo menjadi Kecamatan dengan Jumlah Penduduk terbesar dan Kecamatan Wolowa adalah Kecamatan dengan jumlah

penduduk paling sedikit. Komposisi dan jumlah penduduk tiap kecamatan dapat dilihat pada grafik dan table di bawah ini:

Grafik 1. 1

Persentase Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Buton Tahun 2024



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton (PDAK Kemendagri RI Semester II Tahun 2024)

Tabel 1. 2
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Tahun 2024	Laju Pertumbuhan Penduduk Pertahun
1	Lasalimu	13.363	0,38
2	Lasalimu Selatan	16.077	0,21
3	Siotapina	16.900	0,16
4	Pasarwajo	46.485	0,21
5	Wolowa	6.923	0,61
6	Wabula	6.791	0,40
7	Kapontori	15.485	0,21
	JUMLAH	119.353	.....

Sumber : BPS, Buton Dalam Angka 2025

4. Kondisi Perekonomian Daerah

Meningkatnya nilai tambah dari suatu proses kegiatan ekonomi menunjukkan adanya perkembangan perekonomian suatu daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah menunjukan makin berkembangnya aktifitas perekonomian baik aktifitas produksi, konsumsi, investasi maupun perdagangan di daerah tersebut yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

Secara umum perekonomian masyarakat Kabupaten Buton bertumpu pada beberapa sektor. Gambaran mengenai kondisi ekonomi Kabupaten Buton yang meliputi potensi unggulan daerah dan pertumbuhan ekonomi dipaparkan sebagai berikut :

a) Potensi Sumber Daya Alam dan Daerah

Berdasarkan kondisi alamnya, maka Kabupaten Buton memiliki 2 (dua) jenis komoditas unggulan, yakni; ASPAL dan PERIKANAN LAUT. Keberadaan aspal Buton yang telah di eksplorasi dan di eksploitasi sejak zaman Belanda merupakan tempat kedua di dunia atas temuan adanya aspal alam setelah TRINIDAD. Sedangkan menurut kondisi Kabupaten Buton sebagai hamparan pulau-pulau yang dikelilingi oleh laut lepas dan pertemuan arus Utara-Selatan, mengakibatkan daerah ini sangat kaya dengan potensi perikanan laut.

b) Potensi Sumber Daya Pesisir Dan Laut

Kabupaten Buton mempunyai potensi sumberdaya pesisir dan laut antara lain :

- Perikanan laut hasil tangkapan
- Perikanan budidaya

c) Potensi Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan

Tanaman Jambu Mete merupakan salah satu komoditi unggulan Kabupaten Buton dimana komoditas ini adalah salah satu komoditas khas Kabupaten Buton di Sulawesi Tenggara

d) Potensi Pariwisata dan Budaya

Selain dikenal sebagai penghasil aspal terbesar di Indonesia, Kabupaten Buton juga memilki sejuta daya tarik pada alam laut dan hutannya, serta kaya akan budaya dan tradisi yang unik dan eksotik. Terletak di jalur Wallacea yang kaya akan flora dan fauna, Buton memiliki potensi beragam ekosistem, sehingga menjadi tempat penelitian menarik bagi upaya pelestarian lingkungan dan pengembangan ekoturism. Beberapa obyek wisata yang menarik dikunjungi antara lain : Suaka Margasatwa Lambusango dan cagar alam Kakenauwe. Merupakan hutan hujan tropis yang belum tersentuh, dan menjadi rumah bagi spesies endemik seperti anoa, macaque, tersius, kuskus dan beberapa jenis burung. Saat ini sumber daya alam yang eksotis ini pengelolaannya menjadi tanggung jawab Operation Wallacea. Pengunjung dapat mencapai hutan lindung tersebut dengan menggunakan minibus lokal selama satu setengah jam. Kawasan Pantai Koguna. Merupakan kawasan pantai yang terletak di Kecamatan Lasalimu Selatan dengan luas arealnya berada pada hutan produksi sebesar 1.071 Ha, luas APL di pesisir pantai sebesar 3,6 Ha dengan panjang pantai 9,5 km, pada kawasan ini terdapat pula obyek wisata danau udang merah seluas 0,2 Ha, batu terbelah seluas 0,3 Ha. Dalam rangka peningkatan promosi wisata budaya Pemerintah Kabupaten Buton telah mengagendakan pelaksanaan festival budaya tua buton setiap tahun dimana pelaksanaannya dilaksanakan sejak tahun 2013 yang kegiatannya dikemas dalam kegiatan tari kolosal, kande kandea, posuo (pingitan), dole-dole (imunisasi bagi balita) serta sunatan masal. Berbagai potensi pariwisata tersebut juga didukung oleh potensi budaya berupa peninggalan sejarah, hal ini dapat dilihat terdapat berbagai peninggalan sejarah antara lain benteng kamaru, benteng lawalangke, benteng togomatonu di Kecamatan lasalimu, benteng ambuau, benteng kondala, benteng batukombei, benteng togo boneo, benteng kopea, benteng labuae, makam syeh salim di kecamatan lasalimu selatan, benteng yang terdapat di Kecamatan siotapina, wabula, Wolowa, dan Kapontori.

e) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator utama perkembangan ekonomi suatu daerah yang didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi dalam suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun.

Tabel 1. 3
PDRB Kabupaten Buton Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Kabupaten Buton Tahun 2022-2024

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Buton Atas Dasar Harga Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar Rupiah)		
	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	958,38	1.048,70	**1.147,35**
Pertambangan dan Penggalian	1.779,05	1.992,17	1.830,42
Industri Pengolahan	115,24	107,78	132,41
Pengadaan Listrik dan Gast	1,91	2,11	2,35
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17,20	19,12	19,46
Konstruksi	269,88	268,41	325,26
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	646,94	746,31	819,85
Transportasi dan Pergudangan	37,74	41,82	47,17
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,86	6,03	6,51
Informasi dan Komunikasi	12,86	13,08	14,98
Jasa Keuangan dan Asuransi	33,21	36,74	35,76
Real Estatet	20,95	22,10	22,87

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Buton Atas Dasar Harga Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar Rupiah)		
	2022	2023	2024
Jasa Perusahaan	0,80	0,91	0,98
Adm. Pemerintahan,Pertahanan JamSos Wajib	380,86	417,31	530,96
Jasa Pendidikan	246,53	269,56	287,70
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	38,66	39,89	42,14
Jasa lainnya	25,88	30,62	31,08
PDRB	4.591,95	5.062,66	5.297,27

Sumber : BPS Kabupaten Buton (Buton Dalam Angka 2025)

E. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Kabupaten Buton telah membentuk Kelembagaan Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditindaklanjuti dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton.

Adapun Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Buton sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Tipe B
b. Sekretariat DPRD Tipe C

c. Inspektorat Daerah Tipe B

d. Dinas Daerah Kabupaten Buton, terdiri dari:

1) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A
2) Dinas Pariwisata Tipe A
3) Dinas Perikanan Tipe A
4) Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Tipe A
5) Dinas Pendidikan Tipe B
6) Dinas Kesehatan Tipe B
7) Dinas Perhubungan Tipe B
8) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B
9) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tipe B
10) Dinas Transmigrasi Tipe B
11) Dinas Pertanian Tipe B
12) Dinas Perindustrian Tipe B
13) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B
14) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe B
15) Dinas Sosial
16) Dinas Pengendalian Pendudukan dan KB Tipe B
17) Dinas Lingkungan Hidup Tipe B
18) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tipe B
19) Dinas Ketahanan Pangan Tipe B
20) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B
21) Dinas Penanaman Modal & PTSP Tipe B
22) Dinas Kearsipan & Perpustakaan Daerah Tipe B
23) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B
24) Dinas Tenaga Kerja Tipe C
25) Dinas Perdagangan Tipe C
26) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C
27) Dinas Kebudayaan Tipe C

e. Badan Daerah, terdiri dari:
   1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B
   2) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B
   3) Badan Pendapatan Daerah Tipe B
   4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C
   5) Badan Riset dan Inovasi Daerah Tipe C
   6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A
   7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

f. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Kelas C

g. Kecamatan yang berjumlah 7 (tujuh).

Sejak Tahun 2014 Wilayah administratif Kabupaten Buton mempunyai 7 (tujuh) Kecamatan yang membawahi dari 83 Desa dan 12 Kelurahan, yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 4

Jumlah Desa/Kelurahan Pada Masing-masing Kecamatan Tahun 2024

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Banyaknya		
			Desa	Kelurahan	Jumlah
1.	Lasalimu	Kamaru	14	1	15
2.	Lasalimu Selatan	Ambuau	16	0	16
3.	Siontapina	Kumbewaha	11	0	11
4.	Pasarwajo	Pasarwajo	13	9	22
5.	Wabula	Wabula	7	0	7
6.	Wolowa	Waole	7	0	7
7.	Kapontori	Mataumpana	15	2	17
Jumlah			**83**	**12**	**95**

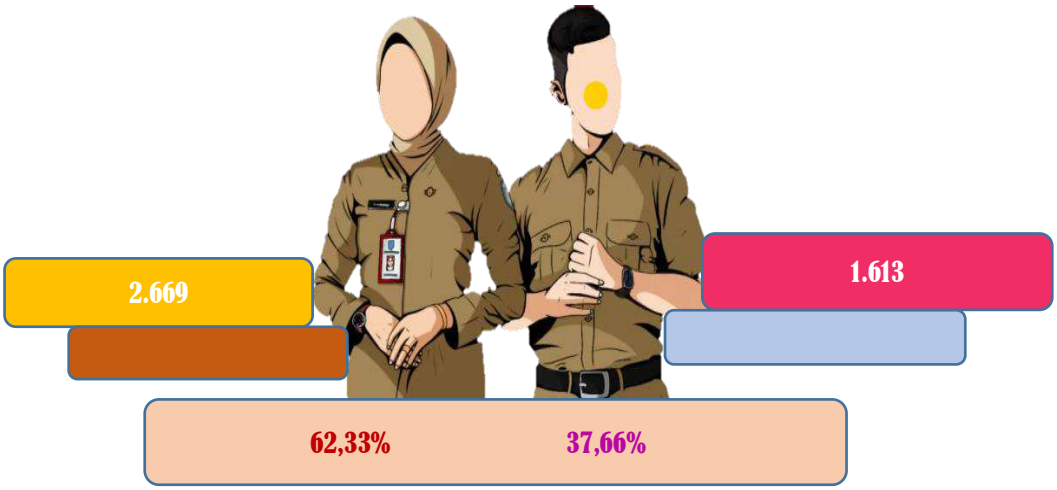
Sumber : Kabupaten Buton Dalam Angka Tahun 2025

Pada Tabel 1.4 di atas menunjukkan bahwa jumlah desa dan kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Pasarwajo (13 desa dan 9 kelurahan), menyusul Kecamatan Kapontori (15 desa dan 2 kelurahan), Kecamatan Lasalimu (14 Desa dan 1 Kelurahan), sedangkan 4 (empat) Kecamatan lain hanya terdapat desa tanpa kelurahan, dan Kecamatan yang memiliki Desa terbanyak adalah Kecamatan Lasalimu Selatan (16 Desa), Kecamatan Siotapina (11 Desa) dan 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Wabula dan Kecamatan Wolowa masing-masing mempunyai 7 Desa.

F. Sumber Daya Manusia Aparatur

Dalam menyelenggarakan kewenangan daerah yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi, salah satu pendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) Pemkab.Buton pada tahun 2024 berjumlah 4.282 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.613 orang dan perempuan sebanyak 2.669 orang.

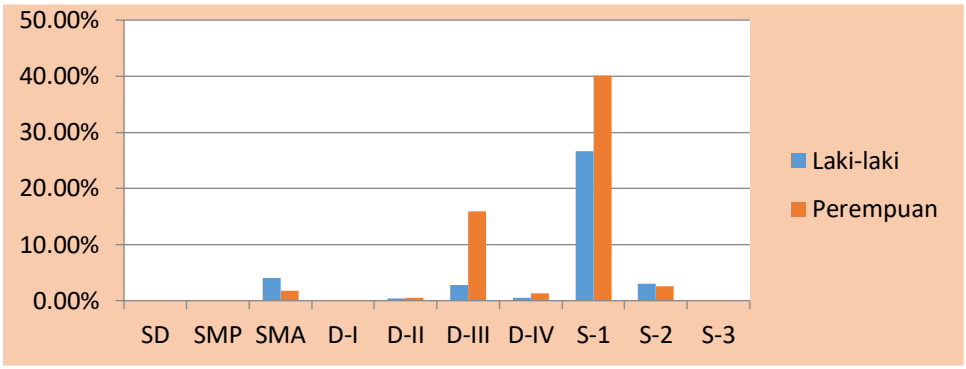
Gambar 2
Komposisi Aparatur Kabupaten Buton Menurut Jenis Kelamin



Sedangkan berdasarkan pendidikan, SDM Pemkab.Buton jenjang pendidikan S1 sebanyak 66,67% atau 2.855 orang, disusul oleh jenjang pendidikan DIII sebanyak 18,75% atau 803 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan SDM Pemkab.Buton cukup baik. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1. 2

Komposisi Aparatur Pemkab.Buton Menurut Pendidikan Tahun 2024



Sumber: (BKPSDM Kabupaten Buton per Desember 2024)

G. Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan memberikan pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan empat tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran pembangunan akan sulit tercapai. Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut dapat ditentukan isu strategis yang akan ditangani dalam lima tahun kedepan.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu internasional, isu dan kebijakan nasional, isu dan kebijakan daerah, serta isu dan kebijakan daerah sekitar, maka isu strategis Kabupaten Buton adalah sebagai berikut :

a. Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Kabupaten Buton mempunyai potensi unggulan sumber daya daerah yang sangat kaya. Hal ini terlihat dari produktivitas hasil pertanian dalam arti luas yang bergerak positif, dan untuk mempercepat pergerakan perekonomian daerah perlu dilakukan pengembangan inovasi dalam mengelola hasil pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan.

Disamping itu, Kabupaten Buton memiliki situs–situs budaya harus tetap dijaga karena sebagai aset wisata bagi wisatawan dalam negeri maupun wisatawan mancanegara. Selain aset wisata yang berupa benda, situ budaya dengan kondisi alam yang unik Kabupaten Buton bisa menghadirkan obyek wisata yang mampu mengundang kunjungan para wisatawan. Dengan ini diharapkan penerimaan dan pendapatan daerah dan masyarakat mampu meningkat. Untuk menarik wisatawan maka perlu tindaklanjut dari pemerintah daerah untuk lebih mengeksplor dan meningkatkan pemasaran tentang potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten Buton.

Selain itu, optimalisasi pengelolaan pertambangan mineral (aspal, nikel, mangan dan mineral lainnya) dan aset lainnya melalui peningkatan peran dan investasi swasta. Dengan adanya produk unggulan Kabupaten Buton adalah Aspal maka Kabupaten Buton harus pandai untuk menyiasati atas ketersediaannya/cadangan dan bagaimana untuk mengoptimalkan pengelolaannya.

Dengan adanya peran investasi swasta maka pengembangan dalam memanfaatkan segala potensi unggulan sumber daya daerah dapat dilakukan dengan maksimal. Pada hakikatnya memanfaatkan hasil sumber daya alam ini harus mempunyai hubungan timbal balik, tidak hanya menikmati hasilnya kemudian meninggalkannya begitu saja. Dengan ini pembangunan yang dilaksanakan harus berwawasan lingkungan, sehingga akan memberikan pemulihan terhadap hasil alam yang telah diambil. Dengan demikian pembangunan tidak hanya akan dinikmati saat ini saja namun sampai anak dan cucu.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pembangunan berkelanjutan merupakan isu krusial yang harus diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah, termasuk dalam RPD. Isu pembangunan berkelanjutan merupakan isu TPB/SDGs yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di mana 3 dari 17 tujuannya adalah berkaitan dengan lingkungan, yaitu penanganan perubahan iklim, pemeliharaan ekosistem laut dan pemeliharaan ekosistem darat. Terkait dengan isu perubahan iklim. Adanya dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim seperti bencana banjir, longsor dan kekeringan menuntut adanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

Penurunan kuantitas dan kualitas cadangan air baku/air bersih di Kabupaten Buton, disebabkan oleh pengelolaan air yang belum optimal, terganggunya kawasan tangkapan air/catchment area, dan eksploitasi air tanah oleh industri. Kondisi ini menjadi ancaman bagi daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Daerah pesisir yang menjadi konsentrasi hunian para nelayan kecil sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Abrasi, badai, pemutihan karang, dan gejala lainnya membutuhkan peningkatan kapasitas adaptif masyarakat pesisir yang berbasis pada kesehatan ekosistem laut dan perubahan perilaku memanfaatkan dan mengelola sumberdaya laut masyarakat pesisir. Peningkatan kapasitas ini akan memperkuat daya lenting sosial (social resilience) yang menjadi landasan dalam menghadapi guncangan eksternal (external shock) akibat bencana terkait iklim (climate-related disaster).

Masih adanya kegiatan pertambangan/penggalian tanpa izin yang berpotensi merusak lahan didorong meningkatnya kebutuhan material untuk pembangunan infrastruktur, disisi lain perizinan belum banyak dipahami oleh masyarakat karena berpindahnya kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi, sehingga

perlu ditingkatkan lagi pengawasan terhadap kegiatan pertambangan/penggalian tanpa izin yang melibatkan penegak hukum. Demikian pula kejadian bencana tanah longsor, banjir, kebakaran hutan dan kekeringan disebabkan perubahan iklim global, rendahnya pelaksanaan kegiatan konservasi di wilayah rawan longsor dan wilayah yang memiliki potensi sumber air, kurangnya SDM dan sarpras dalam penanganan bencana, dan perilaku masyarakat (buang sampah sembarangan, penggundulan hutan). Masih kurangnya pengetahuan mitigasi/deteksi dini bencana oleh masyarakat dan tanggap bencana masyarakat untuk mengantisipasi bencana tsunami, banjir, kekeringan, longsor yang belum optimal, hal ini disebabkan koordinasi dan integrasi antar sektor, lintas sektor/lintas bidang dan lintas wilayah, serta kurangnya dukungan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan dan kurangnya keterlibatan masyarakat, selain itu masih perlu untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana, memperkuat peringatan dini bencana, memperkuat manajemen kedaruratan dan melakukan percepatan pemulihan pasca bencana.

b. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam proses keberhasilan suatu pembangunan. Pembangunan memegang merupakan suatu proses perubahan disegala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu. Sumber daya manusia sebagai potensi yang terkandung dalam diri manusia harus mampu mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.

Pembangunan manusia di Kabupaten Buton terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Buton walaupun ditengah pademi Covid-19. IPM Buton meningkat

dari 64,47 pada 2017 menjadi 66,32 pada 2021. Selama periode 2017 hingga 2021 pembangunan manusia di Buton berstatus sedang.

Berdasarkan dimensinya yang terdiri dari dimensi pengetahuan/pendidikan, dengan komponen rata-rata lama sekolah (RLS) selama 7,92 tahun dan harapan lama sekolah (HLS) 13,76 tahun. Meningkatnya angka RLS dan HLS ini tentunya seiring dengan memadainya fasilitas pendidikan. Kedepan, fasilitas pendidikan harus semakin baik karena dilembaga itulah akan melahirkan manusia yang menjadi masa depan bangsa.

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam proses pembangunan. Pendidikan dimaksudkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pengembangan kompetensi individu. Kompetensi dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan mendorong peningkatan pendapatan, sehingga tidak akan ada lagi masyarakat Sultra yang tidak mempunyai kesempatan berusaha dan bekerja hanya karena tingkat pendidikan yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Pembangunan manusia di bidang pendidikan harus mengedepankan pada akses dan mutu pendidikan untuk semua yaitu setiap penduduk usia sekolah memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi gender dan sosial ekonomi serta mendapatkan pendidikan budaya dan karakter dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal. Tidak hanya itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang di sertai dengan perubahan proses berbagai aspek kehidupan sosial menuntut terciptanya masyarakat yang gemar membaca. Perpustakaan sebagai organisasi publik memiliki peranan strategis untuk turut mendukung mencerdaskan kehidupan bangsa. Maju mundurnya perpustakaan ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan masyarakat, bahkan minat baca dijadikan salah satu indikator yang dapat menunjukkan maju tidaknya suatu bangsa. Peran penting perpustakaan dalam membina dan meningkatkan minat baca masyarakat, karena dengan membaca diharapkan seseorang akan memperoleh informasi dari

bahan pustaka yang dibaca dan memperoleh pengertian mendalam tentang suatu peristiwa atau gejala. Dengan adanya minat baca akan diperoleh hasil yang maksimal, baik itu informasi, pengertian, pengetahuan, keterampilan, motivasi atau fakta seperti yang disajikan oleh bahan bacaan. Untuk itu, pembangunan sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai dengan jumlah koleksi bahan pustaka yang lengkap menjadi hal penting dalam meningkatkan literasi masyarakat.

Di bidang kesehatan, pembangunan fasilitas kesehatan ditujukan untuk memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Layanan kesehatan di Kabupaten Buton ditopang oleh 1 rumah sakit milik pemerintah, 14 pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), 175 pos pelayanan terpadu (Posyandu), serta fasilitas kesehatan lainnya. Jika ditinjau dari sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, maka peranan dan kedudukan puskesmas adalah sebagai ujung tombak sistem pelayanan kesehatan di Indonesia.

c. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, menyatakan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Kondisi penduduk miskin di Kabupaten Buton masih mengalami keterbatasan akses pelayanan dasar meliputi akses pendidikan, kesehatan, air bersih, rumah yang layak, dan pangan. Selain itu, pengembangan kehidupan ekonomi berkelanjutan dirasakan masih sangat rendah, dibuktikan dengan rendahnya kesempatan berusaha dan bekerja karena tingkat pendidikan yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan. Keterbatasan akses

permodalan bagi usaha mikro dan kecil ditambah dengan akses pemasaran masih dirasakan pada kalangan masyarakat miskin hasil produksi belum layak untuk dipasarkan, sehingga akibatnya rumah tangga miskin tidak mampu menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buton selama tahun 2017-2023 cukup berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Oleh sebab itu penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Dengan ini diharapkan kemiskinan merupakan hal yang cukup krusial yang harus ditangani bersama agar pemerintah daerah mampu menyukseskan program pembangunan nasional.

d. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan sangat fundamental dalam mewujudkan good governance. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dengan memprioritaskan pada area perubahan seluruh aspek pemerintahan. Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, akan menstimulasi kinerja birokrasi dan mengubah pola pikir pegawai pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

Titik krusial dalam tata kelola pemerintahan adalah keterbukaan informasi dan transparansi publik, akuntabilitas kinerja pembangunan, keterlibatan masyarakat dalam merencanakan kebijakan, dan adanya koordinasi antara pemangku kebijakan dalam mencapai tujuan dalam mewujudkan visi.

Kondisi tersebut harus didukung dengan profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Penyediaan ruang informasi dan pengaduan masyarakat harus semakin transparan dan mudah diakses. Pelayanan publik secara langsung melalui perijinan, administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan kemudahan berusaha serta hak-hak sipil lainnya

semakin ditingkatkan tanpa mengabaikan regulasi yang ditetapkan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan tersebut.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance), Pemerintah Kabupaten Buton diharapkan dapat mengimplementasikannya pada semua struktur pemerintahan, meliputi : akuntabilitas kinerja pembangunan dibangun dimulai dari proses perencanaan partisipatif dan terukur, penganggaran, implementasi, evaluasi hingga pelaporan kinerja. Beberapa indikator atau parameter pengukuran akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) semakin meningkat hingga target yang ingin dicapai bernilai B, dengan indeks reformasi birokrasi yang juga terus meningkat mencapai B. Target tersebut dapat tercapai jika Pemerintah Kabupaten Buton konsisten terhadap siklus manajemen tersebut. Penilaian hasil pengelolaan keuangan negara berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia harus dipertahankan pada penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk mendapatkan opini WTP tersebut wajib memenuhi beberapa kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Capaian kinerja tersebut tentunya harus didukung dengan pemanfaatan teknologi dan informasi yang semakin pesat agar memudahkan proses kerja untuk memperoleh capaian kinerja yang optimal dan mendukung e-government.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas dan profesional dalam menjalankan tugas, mampu menyesuaikan dan memanfaatkan teknologi dan informasi yang berkembang pesat dalam menunjang kinerja individu dan lembaganya, disamping kelembagaan yang tertata dengan baik. Untuk itu, peningkatan kompetensi dan profesionalitas ASN menjadi kunci mutlak yang harus dilakukan, disertai dengan penempatan ASN pada posisi yang tepat dan

mampu produktif dan berkinerja baik pada instansi kerjanya. Penataan kelembagaan yang baik akan mampu bekerja secara efektif dan efisien sesuai tugas dan fungsinya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, diperlukan penguatan kelembagaan mulai dari kelembagaan tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa dan kelurahan.

Pada pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Buton, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tujuan utama perwujudan kesejahteraan masyarakat yang adil, makmur dan berkesinambungan. Dalam kerangka untuk mengimplementasikan pelayanan tersebut, pemerintah daerah haruas berupaya untuk memberikan pelayanan prima sesuai dengan standar pelayanan minimal yang sudah ditetapkan pada masing-masing bidang urusan kepemerintahan oleh kementerian/lembaga negara masing-masing dengan menyesuaikan anggaran dan mengoptimalkan setiap potensi sumber daya di Kabupaten Buton.

Koordinasi yang baik antara pemangku kebijakan untuk memiliki kesamaan pandangan dan kepentingan bersama dengan mengintegrasikan visi dan misi pada masing-masing lembaga merupakan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Koordinasi menjadi faktor yang sangat penting, karena kekacauan koordinasi dapat menyebabkan efisiensi dan efektivitas kerja menjadi terganggu. Koordinasi yang dilakukan meliputi : upaya menjaga keamanan wilayah tetap kondusif dalam kehidupan demokrasi yang damai, aman, dan tetap menjaga norma-norma dalam masyarakat serta norma hukum yang berlaku. Upaya lain yang harus dilakukan yaitu menekan kriminalitas dan aksi-aksi lain yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, sehingga dengan situasi yang kondusif dapat menciptakan iklim yang sejuk, rasa aman, kehidupan masyarakat yang harmonis, perlindungan terhadap hakhak sipil terjaga dan program-program pembangunan di Kabupaten Buton dapat dilaksanakan dengan lancar dan mencapai target.

e. Pembangunan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah

Infrastruktur merupakan fasilitas yang dibangun untuk mendukung, membantu, dan mempermudah segala bentuk aktivitas kehidupan manusia. Pembangunan infrastruktur diyakini akan memiliki multiplier effect yang signifikan bagi ekonomi masyarakat. Saat ini, pembangunan infrastruktur masuk sebagai salah satu program prioritas pembangunan untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan sumber daya air serta perumahan sehat menjadi isu penting menunjang kegiatan masyarakat dalam bidang perekonomian, pertanian, perkebunan, pariwisata, pertambangan, dan bidang-bidang lainnya.

Pemerintah Kabupaten Buton terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur berupa bangunan fisik seperti jaringan jalan dan jembatan, pelabuhan, jaringan irigasi, drainase, air bersih/air minum, sanitasi, bangunan pelengkap kegiatan pemukiman lainnya dan infrastruktur publik lainnya baik secara kuantitas maupun kualitas.

Berdasarkan informasi data capaian kinerja di bidang pembangunan infrastruktur jalan, panjang jalan yang telah terbangun di Kabupaten Buton sampai tahun 2023 sepanjang 670.313,2 km, yang terdiri dari 187.954 km jalan nasional, 89,2 km jalan provinsi, dan 482.270 km jalan kabupaten. Sedangkan Proporsi panjang jalan kondisi baik dari tahun ke tahun semakin meningkat, pada tahun 2023 sebesar 42,30 persen. Meskipun ketersediaan jalan sudah mencukupi, akan tetapi di sisi lain terdapat beberapa aspek yang masih harus terus ditingkatkan pencapaiannya. Beberapa aspek tersebut antara lain belum terintegrasinya secara menyeluruh antara pusat–pusat kegiatan/produksi ke daerah pemasaran, di wilayah Kabupaten Buton. Hal ini akan berdampak pada terhambatnya arus barang dan jasa antar wilayah tersebut. Tingginya tingkat kerusakan jalan, baik rusak ringan, sedang, maupun berat. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat keselamatan pengguna jalan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selain itu kerusakan jalan juga berdampak pada bertambahnya waktu tempuh yang diperlukan Di bidang infrastruktur pengairan,

pembangunan diarahkan kepada upaya pemenuhan ketersediaan air baku masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari, pemenuhan ketersediaan air irigasi untuk pertanian serta upaya penanggulangan bahaya banjir dan abrasi kawasan pantai.

Disisi lain, peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat dan laut juga menjadi suatu prioritas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk melakukan mobilitas dan distribusi barang lintas daerah. Distribusi barang yang didominasi melalui angkutan darat dan laut selain kapasitas angkut yang lebih besar, juga besaran biaya distribusi yang lebih minim. Untuk itu, kualitas pelayanan perhubungan khususnya angkutan darat perlu ditingkatkan melalui peningkatan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, koordinasi, pengembangan dan penataan jalur transportasi, peningkatan fasilitas keselamatan dan optimalisasi pengawasan dan pengendalian perhubungan.

Belum optimalnya dan meratanya penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, energi, dan kelistrikan secara merata menjadi salah satu kendala utama pembangunan wilayah Kabupaten Buton. Kesenjangan ketersediaan infrastruktur akan mengakibatkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang terlihat dari rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia baik dari sisi pendidikan, kesehatan, perekonomian maupun kehidupan yang layak. Selain itu, kondisi infrastruktur Kabupaten Buton sekarang ini masih dalam on progress pembangunan, dan dalam hal ini Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan dan melakukan pemerataan pembangunan di berbagai bidang, sehingga hal ini akan meminimalisir kesenjangan ekonomi antara masyarakat perkotaan dengan di daerah pedalaman, perbatasan dan daerah terpencil.

H. Sistematika Penyajian

Laporan akuntabilitas tahunan Pemerintah Kabupaten Buton tahun 2023 ini disusun dalam empat Bab masing-masing Bab I merupakan Pendahuluan, Bab II

Perencanaan dan Penetapan Kinerja, Bab III berisi Akuntabilitas Kinerja, Bab IV Penutup.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menjadi tantangan tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Buton ditetapkan visi daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buton tahun 2005-2025 yaitu:

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDUSTRI DAN BERBUDAYA DI KABUPATEN BUTON TAHUN 2025"

Pengertian "Masyarakat Industri" pada visi tersebut adalah suatu masyarakat yang dalam kehidupan sehari-harinya melakukan usaha dalam segala sektor dan segala bentuk berorientasi profit (*provit oriented*). Sedangkan "Berbudaya" mengandung makna memiliki kepribadian dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa umumnya dan budaya buton khususnya dan senantiasa mengapresiasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu berakulturisasi dengan pengaruh budaya-budaya luar serta lestarinya aset-aset budaya peninggalan leluhur.

Berdasarkan pernyataan di atas, makna dari Visi Kabupaten Buton adalah Kabupaten Buton ingin mewujudkan daerah yang menyejahterakan masyarakat melalui perekonomian yang terus tumbuh dan berkembang (bisnis) disertai dan

didukung oleh nilai-nilai budaya yang memberikan dampak positif terhadap masyarakat dalam segala aspek kehidupannya. Dengan masyarakat yang sejahtera maka akan menjadikan Buton sebagai kawasan terdepan yang handal dan menjadi andalan dalam pembangunan seluruh sektor. Dengan demikian akan tercipta daerah yang mandiri, handal, tangguh dan nyaman untuk seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Buton.

2. Misi

Dalam upaya mengoperasionalkan visi tersebut dan dengan memperhatikan perubahan paradigma pembangunan Nasional, Provinsi dan isu-isu strategis serta kondisi yang akan dihadapi Kabupaten Buton pada masa yang akan datang maka misi pembangunan Kabupaten Buton pada tahun keempat RPJPD, sebagai berikut:

1. Misi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi, Pemerataan Pendapatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.

   Misi ini diarahkan pada perwujudan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton, dengan titik perhatian utama adalah dengan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dengan mengutamakan peningkatan pada ”Core Bussines” yaitu pertumbuhan sektor pertanian, perikanan dan kelautan sebagai basis ekonomi masyarakat serta sektor-sektor penyangga yaitu pertambangan dan pariwisata sebagai alternatif penggerak pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya peningkatan kinerja sektor utama dan penyangga tersebut maka keterlibatan masyarakat sangat diperlukan. Dalam hal ini diperlukan pemberdayaan masyarakat dalam berberbagai bentuk dan pendekatan. Pemberdayaan masyarakat mempunyai makna bahwa antara pemerintah dan masyarakat terjadi suatu hubungan yang positif dalam arti bahwa masyarakat ikut berperan aktif dalam pembangunan ekonomi sehingga masyarakat Kabupaten Buton tidak hanya menempatkan diri sebagai obyek pembangunan namun sekaligus sebagai pelaku (subyek) pembangunan.

Peningkatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah dilakukan dengan memperkuat perekonomian berbasis keunggulan masing-masing sektor andalan menuju keunggulan kompetitif. Hal ini diperkuat dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan khususnya dalam pelayanan jasa; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada ekonomi rakyat, kelompok dan wilayah yang masih lemah, menanggulangi kemiskinan secara drastis, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, dan kesempatan yang sama dalam berusaha serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender. Ini ditempuh dengan memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan keberadaan dan kegunaan SDA dan lingkungan hidup, dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung, kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi; pemanfaatan ekonomi SDA dan lingkungan yang berkesinambungan; pengelolaan SDA dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; dan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

2. Misi Mewujudkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

   Misi ini diarahkan pada pencapaian SDM yang mempunyai keunggulan kompetitif (berdaya saing tinggi), kompetensi tinggi, menekan berbagai pengaruh negatif yang dapat merusak citra pendidikan Kabupaten Buton; menciptakan sistem dan kebijakan pendidikan yang unggul; membantu penyediaan sarana dan prasarana pendidikan;penyediaan pelayanan kesehatan yang memadai; penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang baik; kebijakan dan sistem kesehatan masyarakat yang mantap; penyediaan SDM pelayanan kesehatan yang berkualitas; dan mempunyai kompetensi yang

tinggi. Pembangunan SDM yang berkualitas tersebut harus mendapat dukungan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat, pemerintah daerah dan swasta.

3. Misi Mewujudkan Good Governance, Clean Government pada Pemerintahan Kabupaten Buton yang Berkeadilan, Demokratis dan Berlandaskan Hukum

   Misi ditempuh dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan dan kebebasan media komunikasi untuk kepentingan masyarakat; melakukan pembenahan struktur kelembagaan dan meningkatkan budaya tertib hukum; tidak diskriminatif, berkeadilan gender dan memihak pada rakyat kecil.

4. Misi Mewujudkan Kabupaten Buton yang Aman dan Bersatu Melalui Penerapan Nilai-nilai Budaya Buton yang Lestari

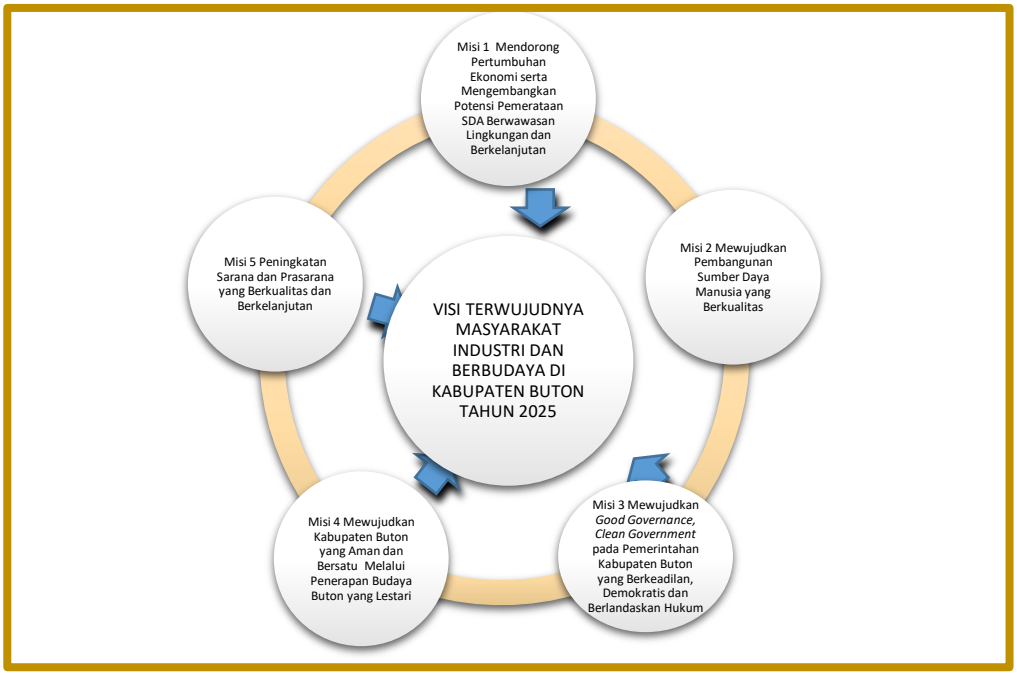
   Misi ini mendorong pembangunan yang mampu mewujudkan rasa aman dan damai, mampu menampung aspirasi masyarakat yang dinamis,peningkatan integritas setiap pribadi masyarakat , memperkuat karakter masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; patuh dan taat hukum; memelihara kerukunan serta toleransi masyarakat dan antar umat beragama; mengembangkan semangat kekeluargaan; menegakkan norma-norma sosial, kesopanan, kesusilaan dan norma-norma agama.Kemudianmelaksanakan interaksi antar budaya; mengembangkan kehidupan sosial kemasyarakatan; menerapkan nilai-nilai luhur Kabupaten Buton; dan memiliki kebanggaan sebagai masyarakat Kabupaten Buton dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral dan etika pembangunan serta menginventarisasi dan melindungi potensi budaya Buton, meningkatkan objek dan daya tarik wisata; menampilkan budaya khas Kabupaten Buton ; mengembangkan jaringan kerjasama wisata dengan berbagai pihak; membangun sarana prasarana wisata yang memadai; menciptakan kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan dunia pariwisata; meningkatkan kesadaran dan partisipasi

seluruh masyarakatdalam pengembangan pariwisata; melakukan promosi dan pemasaran wisata yang efektif.

5. Misi Peningkatan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Misi ini ditempuh melalui pengembangan dan pemanfaatan sarana prasarana daerah yang telah ada serta pembangunan infrastruktur yang memenuhi standar kualitas dan pembangunan yang berkelanjutan.

Gambar 3
Keterkaitan Antara Visi Dengan Misi RPJPD
Kabupaten Buton Tahun 2005-2025

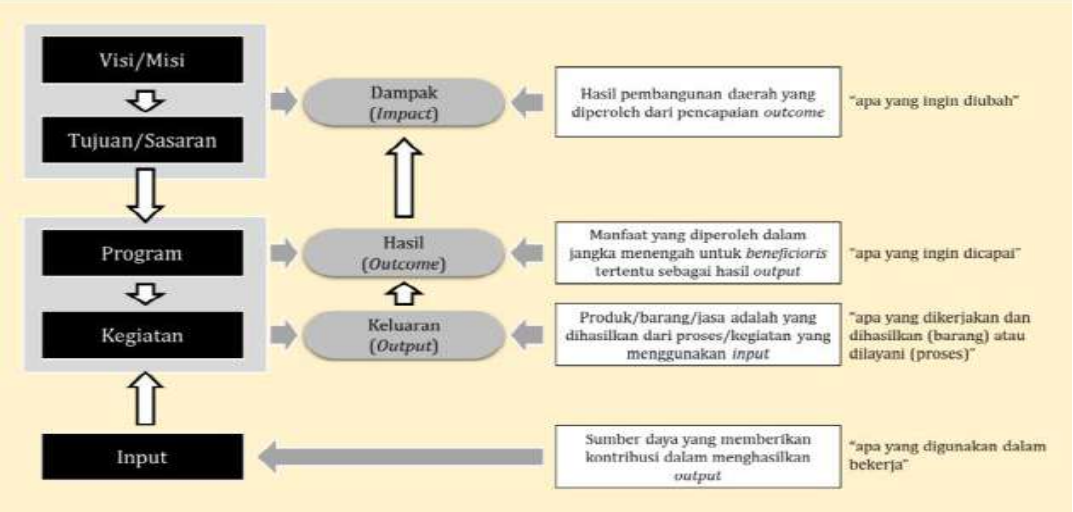


3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang dianalisis berdasarkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4
Skema Visi, Misi dengan Perumusan Tujuan dan Sasaran ,
Program dan Kegiatan



Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 4 (empat) tahun adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1 : Mewujudkan daya saing daerah yang kompetitif dan berwawasan lingkungan Wilayah Kabupaten Buton mempunyai kekayaan dan potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomis tinggi. Pada saat ini potensi sumber daya alam tersebut belum diolah secara maksimal sehingga nilai ekonomisnya masih rendah, seperti pada sektor pertanian, belum ada pengolahan hasil-hasil pertanian yang mampu meningkatkan nilai ekonomis hasil-hasil pertanian Kabupaten Buton. Demikian halnya dengan sektor perikanan juga belum diolah dengan maksimal, padahal hasil perikanan juga tidak kalah jika mampu dikembangkan dengan maksimal, sehingga menghasilkan produk-produk yang berkualitas tinggi dan Kabupaten Buton mampu bersaing dengan produk luar daerah dan luar negeri. Berdasarkan pernyataan di atas, peningkatan daya

saing produk unggulan daerah merupakan pengembangan ekonomi yang menggunakan pendekatan pemanfaatan dan optimalisasi sumber daya unggulan daerah dalam menggerakkan perekonomian daerah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain. Peningkatan daya saing daerah yang kompetitif dan berwawasan lingkungan menjadi langkah yang tepat mengingat komoditas unggulan yang masih dapat ditingkatkan dan dikembangkan dengan maksimal, sehingga pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan lingkungan Kabupaten Buton. Dengan demikian pembangunan dapat dilaksanakan secara terpadu dan seimbang, tanpa merugikan ekosistem lingkungan sekitar. Guna mewujudkan daya saing daerah yang kompetitif dan berwawasan lingkungan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya pertumbuhan potensi ekonomi lokal. Perekonomian lokal dapat tumbuh dan berkembang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 4,1-5,3 persen; pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,9-1,5 persen; pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 9,6-12,6 persen pada tahun 2026.
- Terpeliharanya kualitas lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dapat dilihat dari indeks kualitas air sebesar 53,75 persen, indeks kualitas udara sebesar 87,81 persen, dan indeks kualitas tutupan tanah sebesar 85,40 persen pada tahun 2026.

2. Tujuan 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

   Pendidikan memegang peranan kunci dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga sangat menentukan berhasil atau gagalnya pembangunan yang dilakukan pada suatu daerah. Selanjutnya dengan

pembangunan sumber daya manusia yang merata dan berkualitas, pembangunan akan berjalan dengan lancar jika didukung dengan adanya partisipasi gender dalam pembangunan. Dengan adanya partisipasi gender ini diharapkan pembangunan akan berjalan dengan lebih baik. Partisipasi gender ini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama antara kaum perempuan dan laki-laki untuk melakukan hal-hal yang produktif. Di samping terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kualitas kesehatan juga perlu menjadi perhatian semua pihak dengan mengarahkan pada mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Dengan mengembangkan puskesmas di berbagai daerah dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan di tahun-tahun mendatang harus ditingkatkan agar usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Buton dapat meningkat dari tahun ke tahun. Tujuan pembangunan ini dilaksanakan melalui sasaran:

- Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan. Kualitas pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Buton semakin membaik dapat dilihat dari Angka Harapan Lama Sekolah (tahun) naik menjadi 13,81 dan Rata-rata lama sekolah naik menjadi 8,94 tahun pada tahun 2026, dan Angka Harapan Hidup yang naik menjadi 70,24 tahun pada tahun 2026.
- Menurunnya angka kemiskinan daerah. Keberhasilan peningkatan pendapatan masyarakat pada tahun 2026 diukur dari penurunan angka kemiskinan pada tahun 2026 mencapai 12,25-11,98 persen, peningkatan Pendapatan Perkapita semakin naik menjadi Rp. 30,60 - Rp. 31,30 juta rupiah, peningkatan Pengeluaran Perkapita sebesar Rp. 7.325 ribu, Gini Ratio sebesar 0,19-0,12, dan penurunan Angka Pengangguran sebesar 3,39-3,20 persen pada tahun 2026.
- Meningkatnya kualitas anak, perempuan, pemuda dan olah raga. Tingkat keberhasilan sasaran ini dapat dilihat dari kategori Kabupaten Layak Anak yang mencapai nilai 450-550 dengan kategori Pratama, pencapaian Indeks

Pembangunan Gender (IDG) sebesar 81,42 persen, Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Sosial Kemasyarakatan mencapai, dan Persentase Cabang Olahraga yang Terseleksi Mengikuti Event Olahraga Daerah, Regional dan Nasional mencapai 100 persen pada tahun 2026.

3. Tujuan 3 : Mewujudkan Tatanan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih (Clean Governance), Baik (Good Governance), Berkualitas dan Bertanggung Jawab

   Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean governance), baik (good governance), berkualitas dan bertanggung jawab menjadi kunci tercapainya pemerintahan yang berkualitas. Pemerintahan yang bersih, baik dan berkualitas akan memberikan dampak pada pelayanan terhadap masyarakat. Dengan memberikan pelayanan yang terbaik maka akan berdampak baik baik pada beberapa aspek kehidupan masyarakat,seperti mudah dan cepatnya investor melakukan penyelesaian administratif sehingga investor lebih dapat mengembangkan bisnis. Hal ini akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang pastinya berdampak pula pada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan uraian tujuan diatas, sasaran pembangunan ini adalah:

   - Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dianggap berhasil jika pada tahun 2026 skor Nilai SAKIP Kabupaten Buton mencapai 62-73 atau kategori “B”, mendapatkan Opini BPK dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 30-35 persen.
   - Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dari pencapaian Persentase Indeks Desa membangun dengan skor 87,95.

4. Tujuan 4 : Mewujudkan Masyarakat Buton yang Menghargai Nilai-nilai Budaya dan Bersatu Dalam Pembangunan Melalui Pelestarian Budaya dan Peningkatan Pemahaman Norma, Tata Nilai Budaya Buton

   Dengan kekhasan dan keunikan yang miliki oleh Kabupaten Buton, hal ini menjadi potensi yang bernilai ekonomi tinggi dengan memanfaatkan sumber-sumber kekayaan budaya lokal daerah. Melalui pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya lokal akan mampu merangsang tumbuhnya sektor pariwisata pada Kabupaten Buton. Aneka aset budaya dapat dikembangkan dengan maksimal sehingga akan mampu menarik kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Pengembangan sektor wisata ini akan berdampak pada kehidupan masyarakat. Dengan pengembangan pariwisata ini maka akan dapat menarik investor dan meningkatkan PAD. Melalui hal ini pergerakan perekonomian masyarakat dapat lebih bergerak lebih agresif dengan adanya peluang-peluang yang terbuka pada sektor pariwisata. Selain itu pengembangan kekayaan budaya daerah menjadi aktualisasi aspek sosial budaya masyarakat Kabupaten Buton merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari penguatan martabat dan penciptaan kemandirian dalam pembangunan di Kabupaten Buton. Guna mewujudkan masyarakat Buton yang menghargai nilainilai budaya dan bersatu dalam pembangunan melalui pelestarian budaya dan peningkatan pemahaman norma, tata nilai budaya Buton, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

   - Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal. Kekayaan budaya dan kearifan lokal dapat dijadikan salah satu sektor yang dapat menarik investor dan meningkatkan PAD melalui peningkatan Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan mencapai 67,47 persen pada tahun 2026, sehingga melalui pelestarian warisan budaya tak benda tersebut dapat menarik wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara.

- Terciptanya keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum kehidupan sosial masyarakat, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dari pencapaian persentase penyelesaian tindak kejahatan yang mencapai 3,96 persen, dan persentase ormas aktif sebesar 100 persen pada tahun 2026. 5.

5. Tujuan 5 : Mewujudkan konektivtas antar wilayah

   Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat. Penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas dan memadai, akan mendorong pergerakan sektor-sektor perekonomian lainnya. Kondisi infrastruktur dasar yang ada hingga saat ini,dipandang masih belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Buton, dan masih perlu dilakukan perbaikan dan pembenahan terhadap infrastruktur tersebut.

   Salah satu infrastruktur dasar yang harus dipenuhi dalam rangka meningkatkan aktivitas dalam segala bidang adalah infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan konektivitas wilayah. Dengan infrastruktur dan aksesibilitas yang berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendukung konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Selanjutnya dibutuhkan jaringan infrastruktur yang efektif guna meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian dengan sektor perdagangan dan pertambangan melalui kluster dan pengembangan kawasan berdasarkan potensi dan unggulan komoditas daerah, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah :

   - Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata. Keberhasilan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata Kabupaten Buton dapat dilihat dengan capaian indeks infrastruktur wilayah sebesar 31,69 persen pada tahun 2026.
   - Meningkatnya ketersediaan energi listrik. Ketersedian energi istrik merupakan salah satu keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga

kesinambungan pembangunan sektor perekonomian. Keberhasilan ini dilihat dari Rasio Elektrifikasi yaitu sebesar 100 persen pada tahun 2026.

Tabel 2. 1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Buton 2023-2026

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDUSTRI DAN BERBUDAYA DI KABUPATEN BUTON TAHUN 2025								
Tujuan	**Sasaran**	**Indikator Tujuan/Sasaran Daerah**	**Satuan**	**Data Awal**	**Target**			
					2023	**2024**	**2025**	**2026**
Misi 1 : Mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pendapatan dan pengembangan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan								
T1 : Mewujudkan daya saing daerah yang kompetitif dan berwawasan lingkungan		Laju pertumbuhan ekonomi	%	-0,54 (2020)	1,29 - 3	1,90 - 4.5	2,51 - 5	3,12 - 5,5
		Indeks kualitas lingkungan hidup	Nilai	68,45 (2021)	73,16	73,48	73,80	74,12
	Sasaran 1 : Meningkatnya pertumbuhan potensi ekonomi lokal	Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	%	-1,07 (2020)	3,7 – 4,2	3,8 – 4,5	4,0 – 5,0	4,1 – 5,3
		Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan penganggalian	%	-0,24 (2020)	0,02 – 0,19	0,2 – 0,29	0,3 – 0,8	0,9 -1,5
		Laju pertumbuhan	%	-2,37 (2020)	7,76 -8,3	7,85 – 8,5	8,0 -9,6	9,6 – 12,6

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDUSTRI DAN BERBUDAYA DI KABUPATEN BUTON TAHUN 2025								
Tujuan	**Sasaran**	**Indikator Tujuan/Sasaran Daerah**	**Satuan**	**Data Awal**	**Target**			
					2023	**2024**	**2025**	**2026**
		ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor						
	Sasaran 2 : Terkelolanya SDA berwawasan lingkungan	Indeks kualitas air	Nilai	35,94 (2020)	53,35	53,45	53,65	53,75
		Indeks kualitas udara	Nilai	91,98 (2020)	87,37	87,48	87,80	87,81
		Indeks kualitas tutupan tanah	Nilai	80,92 (2020)	80,87	81,99	84,26	85,40
Misi 2 : Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas								
Tujuan 2 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing		Indeks pembangunan manusia	Nilai	66,32 (2021)	66,91	67,23	67,54	67,85
	Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas	Angka harapan	Tahun	13,76 (2021)	13,78	13,79	13,8	13,81

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDUSTRI DAN BERBUDAYA DI KABUPATEN BUTON TAHUN 2025								
Tujuan	**Sasaran**	**Indikator Tujuan/Sasaran Daerah**	**Satuan**	**Data Awal**	**Target**			
					2023	**2024**	**2025**	**2026**
	pendidikan dan kesehatan	lama sekolah						
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,92 (2021)	8,33	8.53	8,74	8,94
		Angka harapan hidup	Tahun	68,39 (2021)	69,24	69,58	69,91	70,24
	Sasaran 4 : Menurunnya angka kemiskinan daerah	Angka kemiskinan	%	13,93 (2021)	13,92 - 12,83	12,82 - 12,54	12,53 – 12,26	12,25 – 11,98
		Pendapatan perkapita	Juta Rupiah	26,5 (2020)	26,6 – 28,89	28,90 – 29,60	29,70 -30,5	30,60 – 31,30
		Pengeluaran perkapita	Ribu rupiah	7.324 (2021)	7.358	7.375	7.392	7.409
		Gini ratio	Nilai	0,4 (2021)	0,4 -0,33	0,33 – 0,26	0,26 – 0,19	0,19 – 0,12
		Tingkat pengangguran terbuka	%	4,74 (2012)	4,74 – 3,97	3,97 -3,50	3,50 – 3,40	3,39 – 3,20

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDUSTRI DAN BERBUDAYA DI KABUPATEN BUTON TAHUN 2025								
Tujuan	**Sasaran**	**Indikator Tujuan/Sasaran Daerah**	**Satuan**	**Data Awal**	**Target**			
					2023	**2024**	**2025**	**2026**
	Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas anak, perempuan, pemuda dan olahraga	Kategori kabupaten layak anak	Nilai (Kategori)	218,12 (2021) (Inisial)	218,12 - 350,00 (Inisial)	350,00 – 380,00 (Inisial)	380,00 – 450,00 (Inisial)	450,00 – 550,00 (Inisial)
		Indeks pembangunan gender	%	79,82 (2019)	80,22	81,22	81,32	81,42
		Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan	%	97,52 (2020)	97,52	98,51	99,01	100
		Persentase cabang olahraga yang terseleksi mengikuti event olahraga daerah, regional dan nasional	%	100 (2020)	100	100	100	100
Misi 3 : Mewujudkan good governance dan clean goverment pada Pemerintahan Kabupaten Buton yang berkeadilan, demokratis dan berlandaskan								

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDUSTRI DAN BERBUDAYA DI KABUPATEN BUTON TAHUN 2025								
Tujuan	**Sasaran**	**Indikator Tujuan/Sasaran Daerah**	**Satuan**	**Data Awal**	**Target**			
					2023	**2024**	**2025**	**2026**
hukum								
Tujuan 3 : Mewujudkan tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean governance), baik (good governance), berkualitas dan bertanggung jawab	Sasaran 6 : Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks reformasi birokrasi	Nilai (Kategori)	48,63 (C) (2021)	51 – 60 (CC)	60 -70 (B)	60 -71 (B)	60 – 72 (B)
		Nilai Sakip kabupaten	Nilai (Kategori)	61,08 (B) (2021)	62 – 70 (B)	62 -71 (B)	62 – 72 (B)	62 – 73 (B)
		Opini BPK	Kategori	WTP (2020)	WTP	WTP	WTP	WTP
		Indeks kepuasan masyarakat	%	17,02 (2020)	17,05 – 25	25 – 26,5	26,5 -30	30 -35
	Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan	Persentase Indeks Desa Membangun (Berkembang)	%	78,31 (2020)	80,72	83,13	85,54	87,95

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDUSTRI DAN BERBUDAYA DI KABUPATEN BUTON TAHUN 2025								
Tujuan	**Sasaran**	**Indikator Tujuan/Sasaran Daerah**	**Satuan**	**Data Awal**	**Target**			
					2023	**2024**	**2025**	**2026**
	pemerintahan desa							
Misi 4 : Mewujudkan Kabupaten Buton yang aman dan bersatu melalui penerapan nilai-nilai budaya buton yang lestari								
Tujuan 4 : Mewujudkan masyarakat Buton yang aman dan menghargai nilai-nilai budaya serta bersatu dalam pembangunan melalui pelestarian budaya dan peningkatan pemahaman norma, tata nilai budaya Buton		Persentase benda, situs dan bangunan cagar budaya yang dilestarikan	%	18,00 (2020)	22	26	30	34
		Angka kriminalitas yang tertangani	Nilai	6,60 (2020)	5,80	5,30	4,82	3,96
	Sasaran 8 : Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan	Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan	%	57,83 (2020)	60,24	62,65	65,06	67,47

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDUSTRI DAN BERBUDAYA DI KABUPATEN BUTON TAHUN 2025								
Tujuan	**Sasaran**	**Indikator Tujuan/Sasaran Daerah**	**Satuan**	**Data Awal**	**Target**			
					2023	**2024**	**2025**	**2026**
	local							
	Sasaran 9 : Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum kehidupan sosial masyarakat	Persentase penyelesaian tindak kejahatan	%	76,32 (2020)	62,48	57,86	53,25	48,64
		Persentase ormas aktif	%	83,87	100	100	100	100
Misi 5 : Meningkatkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan berkelanjutan								
Tujuan 5 : Mewujudkan konektivtas antar wilayah	Sasaran 10 : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata	Indeks konektivitas	Nilai	0,86 (2020)	1	1,14	1,14	1,14
		Indeks infrastrukur wilayah	%	29,26 (2020)	29,87	30,48	31,08	31,69
	Sasaran 11 : Meningkatnya ketersediaan energi listrik	Rasio elektrifikasi	%	88,07 (2020)	91	94	97	100

4. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana pemerintah Kabupaten Buton mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam kertas kerja yang telah dikembangkan, strategi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2023–2026, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Daerah

VISI : Terwujudnya Masyarakat Industri dan Berbudaya di Kabupaten Buton Tahun 2025				
Tujuan	**Sasaran**		**Strategi Daerah**	
Misi 1 : Mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pendapatan dan pengembangan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan				
T1. Mewujudkan daya saing daerah yang kompetitif dan berwawasan lingkungan	1	Meningkatnya pertumbuhan potensi ekonomi lokal	1	Pengembangan dan pemanfaatan potensi ekonomi unggulan daerah
	2	Terpeliharanya kualitas lingkungan dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan	2	Mitigasi dan adaptasi bencana alam dan kerusakan lingkungan melalui pelestarian lingkungan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Industri dan Berbudaya di Kabupaten Buton Tahun 2025				
Tujuan		**Sasaran**		**Strategi Daerah**
Misi 2 : Mewujudkan pembangunan SDM yang berkualitas				
T2	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	3	Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan	3 Peningkatan kualitas pendidikan yang bermutu dan terjangkau
				4 Peningkatan kualitas pendidikan keagamaan
				5 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
				6 Pengendalian pertumbuhan penduduk
		4	Menurunnya angka kemiskinan daerah	7 Peningkatan efektivitas program penanggulangan kemiskinan daerah
				8 Peningkatan daya beli masyarakat
				9 Penurunan jumlah pengangguran
		5	Meningkatnya kualitas anak, perempuan, pemuda dan olahraga	10 Peningkatan akses pelayanan yang berkualitas bagi semua anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya

VISI : Terwujudnya Masyarakat Industri dan Berbudaya di Kabupaten Buton Tahun 2025				
Tujuan	**Sasaran**		**Strategi Daerah**	
			11	Peningkatan kualitas sumber daya perempuan dan kesetaraan gender
			12	Peningkatan pembinaan kepemudaan dan prestasi olahraga
Misi 3 : Mewujudkan good governance dan clean goverment pada Pemerintahan Kabupaten Buton yang berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum				
T3. Mewujudkan tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean goverment), baik (good governance), berkualitas dan bertanggung jawab	6	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	13	Percepatan reformasi birokrasi, perbaikan tata kelola pemerintahan, supremasi hukum, HAM dan demokrasi
	7	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	14	Penguatan penyelenggaraan pemerintahan desa
Misi 4 : Mewujudkan Kabupaten Buton yang aman dan bersatu melalui penerapan nilai-nilai budaya buton yang lestari				
T4. Mewujudkan masyarakat Buton yang aman dan menghargai nilai-nilai budaya serta bersatu dalam pembangunan melalui pelestarian budaya dan	8	Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal	15	Meningkatkan pelestarian terhadap benda situs dan bangunan cagar budaya berbasis pemberdayaan dan kesadaran masyarakat
			16	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam

VISI : Terwujudnya Masyarakat Industri dan Berbudaya di Kabupaten Buton Tahun 2025				
Tujuan	**Sasaran**		**Strategi Daerah**	
peningkatan pemahaman norma, tata nilai budaya Buton				menjaga keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum
Misi 5 : Meningkatkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan berkelanjutan				
T5. Mewujudkan konektivitas antar wilayah	9	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata	17	Peningkatan infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas dan kapasitas jalur darat dan laut antar wilayah dan kawasan strategis serta infrastruktur dasar untuk menunjang ekonomi
	10	Meningkatnya ketersediaan energi listrik		

Sementara itu, Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan empat tahunan guna mencapai sasaran RPD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan empat tahunan dalam RPD. Disamping itu, arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kewilayahan. Analisis permasalahan dan isu-isu strategis kewilayahan akan menjadi basis utama rumusan arah kebijakan pembangunan kewilayahan untuk memberikan prioritas terkait pemerataan pembangunan dan

penciptaan daerah-daerah unggulan. Untuk selanjutnya, fokus kebijakan kewilayahan harus dipedomani bersama seluruh 0PD yang terlibat di dalamnya.

Berikut ini disajikan keterkaitan strategi/prioritas pembangunan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Buton 2023-2026 :

Tabel 2. 3
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Buton

Sasaran		Strategi Daerah		Arah Kebijakan		2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya pertumbuhan potensi ekonomi lokal	1	Pengembangan dan pemanfaatan potensi ekonom unggulan daerah	1	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk perikanan				
				2	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk pertanian				
				3	Peningkatan ketahanan pangan masyarakat				
				4	Peningkatan kapasitas dan pengelolaan koperasi dan UMKM				
				5	Pengembangan industri perdagangan dan industri kreatif				
				6	Pengembangan iklim usaha perdagangan yang sehat, kondusif yang didukung sarana yang memada				
				7	Peningkatan iklim dan promosi investasi serta pembangunan kemitraan dengan dunia usaha				
2	Terpeliharanya kualitas	2	Mitigasi dan adaptasi	8	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan				

Sasaran		Strategi Daerah		Arah Kebijakan		2023	2024	2025	2026
	lingkungan dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan		bencana alam dan kerusakan lingkungan melalui pelestarian lingkungan		hidup melalui peningkatan kapasitas daerah dalam PPLH				
				9	Peningkatan pemantauan kualitas lingkungan				
				10	Peningkatan kualitas penanganan persampahan				
				11	Penurunan emisi karbon dan emisi gas rumah kaca				
				12	Percepatan pembangunan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan				
				13	Peningkatan pelayanan pengendalian bencana				
3	Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan	3	Peningkatan kualitas pendidikan yang bermutu dan terjangkau	14	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran				
				15	Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata				
				16	Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antar wilayah				
				17	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana, prasarana, dan utilitas pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah				

Sasaran		Strategi Daerah		Arah Kebijakan		2023	2024	2025	2026
				18	Peningkatan minat baca dan literasi masyarakat				
		4	Peningkatan kualitas pendidikan keagamaan	19	Peningkatan kualitas pembinaan dan pelayanan kehidupan beragama				
		5	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	20	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan				
				21	Peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana serta ketersediaan perbekalan kesehatan				
				22	Percepatan penurunan prevalensi stunting melalui konvergensi penanganan stunting				
				23	Peningkatan cakupan jaminan kesehatan				
				24	Penerapan pola hidup bersih dan sehat melalui penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas)				
				25	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular				
				26	Akreditasi RSUD dan puskesmas serta optimalisasi layanan BLUD RSUD				
		6	Pengendalian pertumbuhan	27	Menekan angka total fertility rate (TFR)				

Sasaran		Strategi Daerah		Arah Kebijakan		2023	2024	2025	2026
			penduduk	28	Peningkatan peserta KB aktif dan mandiri				
				29	Peningkatan keluarga sejahtera				
4	Menurunnya angka kemiskinan daerah	7	Peningkatan efektivitas program penanggulangan kemiskinan daerah	30	Perluasan akses pendidikan murah dan terjangkau bagi masyarakat miskin				
				31	Penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin				
				32	Peningkatan kualitas fasilitas perumahan masyarakat miskin				
				33	Peningkatan pelayanan masalah kesejahteraan sosial				
		8	Peningkatan daya beli masyarakat	34	Peningkatan pendapatan masyarakat miskin berbasis potensi lokal				
				35	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro kecil menengah dan koperasi				
		9	Penurunan jumlah pengangguran	36	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar				
				37	Perluasan informasi pasar kerja				
5	Meningkatnya kualitas anak, perempuan, pemuda dan	10	Peningkatan akses pelayanan yang berkualitas	38	Peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi seluruh anak terutama bagi anak yang berada pada situasi				

Sasaran		Strategi Daerah		Arah Kebijakan		2023	2024	2025	2026
	olahraga		bagi semua anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya		dan kondisi khusus				
				39	Peningkatan kapasitas Forum Anak di tingkat daerah dan kecamatan				
		11	Peningkatan kualitas sumber daya perempuan dan kesetaraan gender	40	Peningkatan pemberdayaan masyarakat berafirmatif gender				
				41	Penguatan kelembagaan PUG				
		12	Peningkatan pembinaan kepemudaan dan prestasi olahraga	42	Peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan				
				43	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga				
				44	Peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan				
6	Meningkatnya akuntabilitas dan	13	Percepatan reformasi birokrasi,	45	Penataan organsisai dan tata laksana serta peningkatan kapasitas aparatur				

Sasaran		Strategi Daerah		Arah Kebijakan		2023	2024	2025	2026
	transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		perbaikan tata kelola pemerintahan, supremasi hukum, HAM dan demokrasi	46	Optimalisasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan penerapan eplanning dan e-budget				
				47	Peningkatan pelayanan e-goverment melalui program smart city				
				48	Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan pelayanan terpadu				
				49	Optimalisasi pencapaian standar pelayanan minimal				
				50	Penguatan tata kelola kependudukan				
				51	Peningkatan jumlah dan kualitas data perencanaan yang berkualitas				
				52	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan (SPIP)				
				53	Peningkatan inovasi daerah publik				
				54	Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana perkantoran yang memadai				
7	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	14	Penguatan penyelenggaraan pemerintahan	55	Peningkatan pengembangan potensi desa				
				56	Penguatan nilai-nilai				

Sasaran		Strategi Daerah		Arah Kebijakan		2023	2024	2025	2026
	desa		desa		kearifan desa				
				57	Akselerasi menuju desa yang mandiri				
8	Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal	15	Meningkatkan pelestarian terhadap benda situs dan bangunan cagar budaya berbasis pemberdayaan dan kesadaran masyarakat	58	Pegeloloaan warisan budaya melalui peningkatan sarana dan fasilitasi kegiatan seni budaya masyarakat				
				59	Pembinaan dan mengoptimalkan lembaga/tokoh/adat/keagamaan dan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam kegiatan pembangunan budaya				
9	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata	16	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum	60	Penciptaan harmoniasi dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat melalui optimalsiasi peran forum koordinasi antar umat beragama				
				61	Peningkatan koordinasi Forkopimda				
				62	Peningkatan pembinaan organisasi kemasyarakatan				
10	Meningkatnya ketersediaan energi listrik	17	Peningkatan infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas dan kapasitas jalur darat dan laut antar wilayah dan	63	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas sarana dan prasarana wilayah dan perdesaan				
				64	Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan menuju/dalam kawasan strategis				

Sasaran		Strategi Daerah		Arah Kebijakan		2023	2024	2025	2026
			kawasan strategis serta infrastruktur dasar untuk menunjang ekonomi	65	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar				
				66	Percepatan pembangunan infrastruktur publik perkotaan				
				67	Peningkatan kualitas lingkungan pemukiman dan perumahan tanpa pemukiman kumuh				
				68	Percepatan pembangunan infrastruktur TIK pada kawasan strategis dan wilayah yang belum terjangkau akses internet				
				69	Percepatan pengembangan dan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik serta pembangkit tenaga listrik alternatif				

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan komitmen antara pemberi amanah dan penerima amanah serta kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, wewenang dan sumber daya yang tersedia.

Perencanaan Kinerja yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Buton pada tahun 2024 yang kemudian ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun bersangkutan. Oleh karena itu, perjanjian kinerja menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Daerah yang pada dasarnya menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja.

Pemerintah Kabupaten Buton telah menetapkan indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buton Tahun 2023-2026. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 4
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buton

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
			2024
Sasaran 1 : Meningkatnya pertumbuhan potensi ekonomi lokal	Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	%	3,8
	Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan penggalian	%	0,2
	Laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	%	7,85
Sasaran 2 : Terkelolanya SDA berwawasan lingkungan	Indeks kualitas air	Nilai	53,45
	Indeks kualitas udara	Nilai	87,48
	Indeks kualitas tutupan tanah	Nilai	81,99
Sasaran 3 : Meningkatnya	Angka harapan lama sekolah	Tahun	13,79

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024
kualitas pendidikan dan kesehatan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,53
	Angka harapan hidup	Tahun	69,58
Sasaran 4 : Menurunnya angka kemiskinan daerah	Angka kemiskinan	%	12,82
	Pendapatan perkapita	Juta Rupiah	28,90
	Pengeluaran perkapita	Ribu rupiah	7,375
	Gini ratio	Nilai	0,33
	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,97
Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas anak, perempuan, pemuda dan olahraga	Kategori kabupaten layak anak	Nilai (Kategori)	350,00
	Indeks pembangunan gender	%	81,22
	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan	%	98,51
	Persentase cabang olahraga yang terseleksi mengikuti event olahraga daerah, regional dan nasional	%	100
Sasaran 6 : Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Sakip kabupaten	Nilai (Kategori)	71
	Opini BPK	Kategori	WTP
	Indeks kepuasan masyarakat	%	25
Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Indeks Desa Membangun (Berkembang)	%	83,13
Sasaran 8 : Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap	Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan	%	62,65

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024
budaya dan kearifan local			
Sasaran 9 : Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum kehidupan sosial masyarakat	Persentase penyelesaian tindak kejahatan	%	57,86
	Persentase ormas aktif	%	100
Sasaran 10 : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata	Indeks infrastrukur wilayah	%	30,48
Sasaran 11 : Meningkatnya ketersediaan energi listrik	Rasio elektrifikasi	%	94

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik.

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Pengukuran kinerja yang dilakukan masih didasarkan pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator

kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1) Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ x } 100\%$$

2) Rumus 2 : Apabila semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA
1	91<	Sangat Tinggi
2	76 < 90	Tinggi
3	66 < 75	Sedang
4	51 < 65	Rendah
5	< 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017 (data diolah)

Pemerintah Kabupaten Buton melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah telah melaksanakan amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A.Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama

Secara umum Pemerintah Kabupaten Buton telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buton Tahun 2023-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

A.1 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Pemerintah Kabupaten Buton telah menetapkan indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buton Tahun 2023-2026. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buton

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
			2024
Sasaran 1 : Meningkatnya pertumbuhan potensi ekonomi lokal	Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	%	3,8
	Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan penggalian	%	0,2
	Laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	%	7,85
Sasaran 2 : Terkelolanya SDA	Indeks kualitas air	Nilai	53,45

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024
berwawasan lingkungan	Indeks kualitas udara	Nilai	87,48
	Indeks kualitas tutupan tanah	Nilai	81,99
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan	Angka harapan lama sekolah	Tahun	13,79
	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,53
	Angka harapan hidup	Tahun	69,58
Sasaran 4 : Menurunnya angka kemiskinan daerah	Angka kemiskinan	%	12,82
	Pendapatan perkapita	Juta Rupiah	28,90
	Pengeluaran perkapita	Ribu rupiah	7,375
	Gini ratio	Nilai	0,33
	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,97
Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas anak, perempuan, pemuda dan olahraga	Kategori kabupaten layak anak	Nilai (Kategori)	350,00
	Indeks pembangunan gender	%	81,22
	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan	%	98,51
	Persentase cabang olahraga yang terseleksi mengikuti event olahraga daerah, regional dan nasional	%	100
Sasaran 6 : Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi	Nilai Sakip kabupaten	Nilai	71

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024
penyelenggaraan pemerintahan daerah		(Kategori)	
	Opini BPK	Kategori	WTP
	Indeks kepuasan masyarakat	%	25
Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Indeks Desa Membangun (Berkembang)	%	83,13
Sasaran 8 : Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan local	Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan	%	62,65
Sasaran 9 : Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum kehidupan sosial masyarakat	Persentase penyelesaian tindak kejahatan	%	57,86
	Persentase ormas aktif	%	100
Sasaran 10 : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata	Indeks infrastrukur wilayah	%	30,48
Sasaran 11 : Meningkatnya ketersediaan energi listrik	Rasio elektrifikasi	%	94

A.2 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2024 berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 2
Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buton Dibandingkan Target perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024			
			Target	Realisasi	(%)	Skor
Sasaran 1 : Meningkatnya pertumbuhan potensi ekonomi lokal	Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	%	3,8	2,83	74,47	Sedang
	Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan penganggalian	%	0,2	-5,73	-2.865	Sangat Rendah
	Laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	%	7,85	6,86	87,38	Tinggi
Sasaran 2 : Terkelolanya SDA berwawasan lingkungan	Indeks kualitas air	Nilai	53,45	62,5	116,93	Sangat Tinggi
	Indeks kualitas udara	Nilai	87,48	94,99	108,58	Sangat Tinggi
	Indeks kualitas tutupan tanah	Nilai	81,99	81,89	99,87	Sangat Tinggi
Sasaran 3 : Meningkatnya	Angka harapan lama sekolah	Tahun	13,79	13,89	100,72	Sangat Tinggi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024			
			Target	Realisasi	(%)	Skor
kualitas pendidikan dan kesehatan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,53	8,63	101,17	Sangat Tinggi
	Angka harapan hidup	Tahun	69,58	70,47	101,27	Sangat Tinggi
Sasaran 4 : Menurunnya angka kemiskinan daerah	Angka kemiskinan	%	12,82	14,41	87,59	Tinggi
	Pendapatan perkapita	Juta Rupiah	28,90	43,41	150,20	Sangat Tinggi
	Pengeluaran perkapita	Ribu rupiah	7,375	8.401	113,91	Sangat Tinggi
	Gini ratio	Nilai	0,33	0,328	100,60	Sangat Tinggi
	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,97	2,95	125,69	Sangat Tinggi
Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas anak, perempuan, pemuda dan olahraga	Kategori kabupaten layak anak	Nilai (Kategori)	350,00	745	212,85	Sangat Tinggi
	Indeks pembangunan gender	%	81,22	82,07	101,04	Tinggi
	Persentase partisipasi pemuda dalam	%	98,51	10,71	10,87	Sangat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024			
			Target	Realisasi	(%)	Skor
	organisasi sosial kemasyarakatan					Rendah
	Persentase cabang olahraga yang terseleksi mengikuti event olahraga daerah, regional dan nasional	%	100	8,82	8,82	Sangat Rendah
Sasaran 6 : Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Sakip kabupaten	Nilai (Kategori)	71	63,52	89,43	Tinggi
	Opini BPK	Kategori	WTP	WTP	100	Sangat Tinggi
	Indeks kepuasan masyarakat	%	25	91,10	364,4	Sangat Tinggi
Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Indeks Desa Membangun (Berkembang)	%	83,13	72,42	87,11	Tinggi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024			
			Target	Realisasi	(%)	Skor
Sasaran 8 : Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal	Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan	%	62,65	100	166	Sangat Tinggi
Sasaran 9 : Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum kehidupan sosial masyarakat	Persentase penyelesaian tindak kejahatan	%	57,86	45,74	79,05	Tinggi
	Persentase ormas aktif	%	100	52,63	52,63	Rendah
Sasaran 10 : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata	Indeks infrastrukur wilayah	%	30,48	29,26	95,99	Sangat Tinggi
Sasaran 11 : Meningkatnya ketersediaan energi listrik	Rasio elektrifikasi	%	94	98,01	104,26	Sangat Tinggi

A.3 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 dibandingkan dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 3
Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2024 Dibandingkan dengan Capaian Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024				Capaian Tahun 2023
		Target	Realisasi	(%)	Skor	(%)
Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	%	3,8	2,83	74,47	Sedang	78,80
Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan penggalian	%	0,2	-5,73	-2.865	Sangat Rendah	1.352,63
Laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	%	7,85	6,86	87,38	Tinggi	84,69
Indeks kualitas air	Nilai	53,45	62,5	116,93	Sangat Tinggi	103,09
Indeks kualitas udara	Nilai	87,48	94,99	108,58	Sangat Tinggi	108,42

Indikator Kinerja Utama	Satuan	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024				Capaian Tahun 2023
		Target	Realisasi	(%)	Skor	(%)
Indeks kualitas tutupan tanah	Nilai	81,99	81,89	99,87	Sangat Tinggi	101,55
Angka harapan lama sekolah	Tahun	13,79	13,89	100,72	Sangat Tinggi	100,72
Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,53	8,63	101,17	Sangat Tinggi	101,92
Angka harapan hidup	Tahun	69,58	70,47	101,27	Sangat Tinggi	101,61
Angka kemiskinan	%	12,82	14,41	87,59	Tinggi	92,67
Pendapatan perkapita	Juta Rupiah	28,90	43,41	150,20	Sangat Tinggi	145,75
Pengeluaran perkapita	Ribu rupiah	7,375	8.401	113,91	Sangat Tinggi	108,65
Gini ratio	Nilai	0,33	0,328	100,60	Sangat Tinggi	103,63
Tingkat pengangguran terbuka	%	3,97	2,95	125,69	Sangat Tinggi	137,53
Kategori kabupaten layak anak	Nilai (Kategori)	350,00	745	212,85	Sangat Tinggi	124,46
Indeks pembangunan gender	%	81,22	82,07	101,04	Tinggi	87,89
Persentase partisipasi pemuda	%	98,51	10,71	10,87	Sangat	6,07

Indikator Kinerja Utama	Satuan	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024				Capaian Tahun 2023
		Target	Realisasi	(%)	Skor	(%)
dalam organisasi sosial kemasyarakatan					Rendah	
Persentase cabang olahraga yang terseleksi mengikuti event olahraga daerah, regional dan nasional	%	100	8,82	8,82	Sangat Rendah	76,47
Nilai Sakip kabupaten	Nilai (Kategori)	71	63,52	89,43	Tinggi	90,21
Opini BPK	Kategori	WTP	WTP	100	Sangat Tinggi	100
Indeks kepuasan masyarakat	%	25	91,10	364,4	Sangat Tinggi	354,72
Persentase Indeks Desa Membangun (Berkembang)	%	83,13	72,42	87,11	Tinggi	87,58
Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan	%	62,65	100	166	Sangat Tinggi	166
Persentase penyelesaian tindak kejahatan	%	57,86	45,74	79,05	Tinggi	144,04
Persentase ormas	%	100	52,63	52,63	Rendah	68,42

Indikator Kinerja Utama	Satuan	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024				Capaian Tahun 2023
		Target	Realisasi	(%)	Skor	(%)
aktif						
Indeks infrastrukur wilayah	%	30,48	29,26	95,99	Sangat Tinggi	97,95
Rasio elektrifikasi	%	94	98,01	104,26	Sangat Tinggi	109,51

A.4 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target akhir dalam rencana pembangunan jangka menengah dalam hal ini Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buton Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 4
Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Akhir Dalam Rencana Pembangunan Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir RPD (2026)	Realisasi Tahun 2024	Capaian 2024 terhadap Target 2026 (%)
Sasaran 1 : Meningkatnya pertumbuhan potensi ekonomi lokal	Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	%	4,1 – 5,3	2,83	53,39
	Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan penggalian	%	0,9 – 1,5	-5,73	-382
	Laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	%	9,6 – 12,6	6,86	53,01
Sasaran 2 : Terkelolanya	Indeks kualitas air	Nilai	53,75	62,5	116,27

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir RPD (2026)	Realisasi Tahun 2024	Capaian 2024 terhadap Target 2026 (%)
SDA berwawasan lingkungan	Indeks kualitas udara	Nilai	87,81	94,99	108,17
	Indeks kualitas tutupan tanah	Nilai	85,40	81,89	95,88
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan	Angka harapan lama sekolah	Tahun	13,81	13,89	100,57
	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,94	8,63	96,53
	Angka harapan hidup	Tahun	70,24	70,47	100,32
Sasaran 4 : Menurunnya angka kemiskinan daerah	Angka kemiskinan	%	12,25 - 11,98	14,41	79,29
	Pendapatan perkapita	Juta Rupiah	30,60- 31,30	43,41	138,69
	Pengeluaran perkapita	Ribu rupiah	7.409	8.401	113,38
	Gini ratio	Nilai	0,19 - 0,12	0,328	-73,33
	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,39 - 3,20	2,95	88,51
Sasaran 5 : Meningkatnya	Kategori kabupaten layak	Nilai (Kategori)	450,00 - 550,00	745	135,45

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir RPD (2026)	Realisasi Tahun 2024	Capaian 2024 terhadap Target 2026 (%)
kualitas anak, perempuan, pemuda dan olahraga	anak		(Pratama)		
	Indeks pembangunan gender	%	81,42	82,07	100,79
	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan	%	100	10,71	10,71
	Persentase cabang olahraga yang terseleksi mengikuti event olahraga daerah, regional dan nasional	%	100	8,82	8,82
Sasaran 6 : Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Sakip kabupaten	Nilai (Kategori)	62-73 (B)	63,52	87,01
	Opini BPK	Kategori	WTP	WTP	100
	Indeks kepuasan masyarakat	%	30 - 35	91,10	260,28

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir RPD (2026)	Realisasi Tahun 2024	Capaian 2024 terhadap Target 2026 (%)
Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Indeks Desa Membangun (Berkembang)	%	87,95	72,42	82,34
Sasaran 8 : Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal	Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan	%	67,47	100	148,21
Sasaran 9 : Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum kehidupan sosial masyarakat	Persentase penyelesaian tindak kejahatan	%	48,64	45,74	94,03
	Persentase ormas aktif	%	100	52,63	52,63

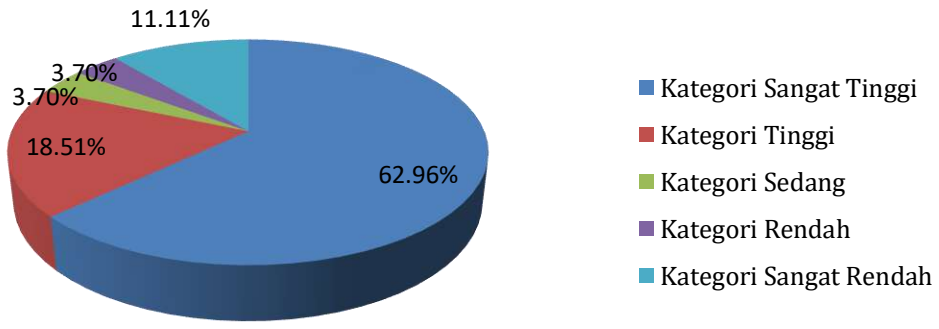
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir RPD (2026)	Realisasi Tahun 2024	Capaian 2024 terhadap Target 2026 (%)
Sasaran 10 : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata	Indeks infrastrukur wilayah	%	31,08	29,26	94,14
Sasaran 11 : Meningkatnya ketersediaan energi listrik	Rasio elektrifikasi	%	100	98,01	98,01

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran/program dimaksudkan untuk melihat keberhasilan atau kegagalan sasaran/program yang ditetapkan dan menilai kemajuan pencapaian sasaran/program yang ditetapkan agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Sedangkan evaluasi dan analisis terhadap kegiatan lebih difokuskan untuk menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam mencapai sasaran/program.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 27 indikator kinerja utama Bupati tahun 2024, disimpulkan bahwa terdapat 17 (Tujuh Belas) capaian indikator sasaran atau sebanyak 62,96% masuk dalam kategori Sangat Tinggi, 5 (Lima) Indikator sasaran atau sebesar 18,51% masuk dalam kategori tinggi, 1 (satu) Indikator sasaran atau sebesar 3,70% masuk dalam kategori sedang, namun ada 1 (satu) indikator sasaran atau 3,70% yang masuk dalam kategori rendah, bahkan ada 3 (tiga) indikator sasaran atau 11,11% masuk kriteria sangat rendah yaitu Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan penggalian dan Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan, serta Persentase cabang olahraga yang terseleksi mengikuti event olahraga daerah, regional dan nasional. Berikut Grafik Capaian Indikator Kinerja Utama Bupati Buton Tahun 2024 :

Grafik 3. 1
Capaian IKU Bupati Tahun 2024



Selanjutnya untuk evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja akan disajikan per-sasaran dengan uraian sebagai berikut :

1) Sasaran 1 : Meningkatnya pertumbuhan potensi ekonomi lokal

Wilayah Kabupaten Buton mempunyai kekayaan dan potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomis tinggi. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah merupakan pengembangan ekonomi yang menggunakan pendekatan pemanfaatan dan optimalisasi sumber daya unggulan daerah dalam menggerakkan perekonomian daerah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain. Guna mewujudkan daya saing daerah yang kompetitif maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah Meningkatnya pertumbuhan potensi ekonomi lokal. Untuk mengukur sejauh mana peningkatan pertumbuhan potensi ekonomi lokal maka digunakan indikator dengan target dan realisasi serta capaian seperti pada tabel di bawah ini:

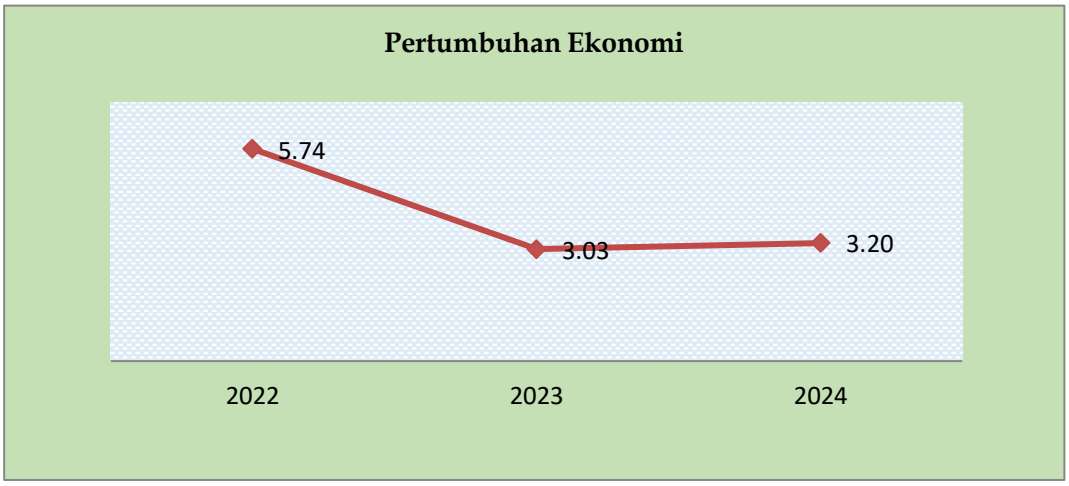
Tabel 3. 5
Capaian Kinerja Sasaran Meeningkatnya Petumbuhan Potensi Ekonomi Lokal

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	%	3,8	2,83	74,47
2	Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan penggalian	%	0,2	-5,73	-2.865
3	Laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran;reparasi mobil dan sepeda motor	%	7,85	6,86	87,38
Capaian Kinerja Sasaran Strategis					**-901,05 (Sangat rendah)**

Sumber : BPS Kabupaten Buton, Buton Dalam Angka 2025

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton selama tiga tahun terakhir (2022-2024) cukup fluktuatif. Pada tahun 2023 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton mengalami penurunan yang siginifikan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yangmana pertumbuhan ekonomi berada pada angka 5,74 % sementara di tahun 2023 turun menjadi 3,03%, pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi kabupaten mengalami peningkatan namun tidak signifikan hanya mencapai angka 3,2%. Gambaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik berikut :

Grafik 3. 2
Trand Pertumbuhan Ekonomi Di kabupaten Buton



Sumber : BPS Kab.Buton, Buton Dalam Angka 2025

Laju pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan. Menurunnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buton pada tahun 2023 dan 2024 juga sangat dipengaruhi oleh menurunnya capaian tiga sektor pendukung yaitu :

- **Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan** Kabupaten Buton pada tahun 2024 capaian kinerjanya sebenarnya 74,47%. Capaian ini diperoleh dari realisasi Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 2,83 dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 3,8. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi target pada tahun 2024 mengalami penurunan, dimana tahun 2023 realisasi mencapai 3,60 sementara di tahun 2024 turun menjadi 2,83. Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan salah satu sektor dalam menghitung PDRB yakni PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor). Pada sektor pertanian, produktivitas sektor pertanian pada dasarnya menujukkan agregat yang cukup bagus, namun produk-produk hasil pertanian sebagian besar dijual dengan hasil mentah, sehingga kurang memberikan nilai tambah ekonomi pada produkproduk pertanian dalam arti luas. Sektor Perikanan pada wilayah Kabupaten Buton terfokus pada pengembangan produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya, namun pemanfaatan potensi perikanan tangkap di Kabupaten Buton masih sangat rendah. Selain itu belum meratanya ketersediaan sarana prasarana pendukung aktifitas pertanian dan perikanan serta peningkatan kapasitas petani dan nelayan yang belum optimal, maka dalam mengembangkan produk-produk pertanian dalam arti luas menjadi sedikit terhambat. Hal ini harus segera ditindaklanjuti selain akan berdampak pada produktivitas, juga akan berdampak pada kesejahteraan para petani dan pekebun. Dengan adanya permasalahan tersebut maka hal ini juga akan mengakibatkan kurang optimalnya pengembangan potensi sektor pertanian dalam arti luas, sehingga potensi-potensi produk pertanian dalam arti luas ini hanya akan bernilai harga jual mentah saja, berbeda jika dengan melakukan pengembangan produk-

produk pertanian dalam arti luas menjadi produk yang setengah jadi atau langsung produk langsung konsumsi, sehingga dengan demikian produk-produk ini akan bernilai ekonomi tinggi. Dengan produk-produk yang berinovasi tinggi maka nilai produk akan meningkat, yang diharapkan akan memberikan dampak juga terhadap kesejahteraan para petani dan nelayan. Dengan sejahteranya para petani dan nelayan, maka para petani dan nelayan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitasnya untuk produktivitas produk-produk pertanian dalam arti luas.

- **Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan penganggalian** juga memberikan kontribusi dalam Pertumbuhan ekonomi di kabupaten Buton. Capaian kinerjanya pada Tahun 2024 mencapai -2.865%. Capaian tersebut diperoleh dari realisasi sebesar -5,73 dibagi dengan target sebesar 0,2. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi target pada tahun 2024 mengalami penurunan, dimana tahun 2023 realisasi mencapai 2,21 sementara di tahun 2024 turun menjadi -5,73. Kebijakan Potensi Sumber daya Alam yaitu Aspal belum mampu memberikan kontribusi dalam menopang perekonomian di daerah. Aspal Merupakan salah Satu Potensi Besar di Kabupaten Buton dan potensi ini tdak dimiliki di daerah Lain selain Dipulau Buton dan salah satu Negara di Trinidad. Kebijakan Aspal Buton secara nasional juga telah dilakukan dengan penguatan regulasi mendukung Penggunaan Aspal Buton khususnya bagi Penggunaan Jalan Propinsi, kabupaten/Kota bahkan jalan Nasional. Hal ini dapat dilihat Kontribusi PDRB kabupaten Buton Tahun 2022 mecapai 5,07 % namun mengalami penurunan di Tahun 2023 sebesar 2,57 %. Diharapkan Penggunaan Aspal Buton untuk kebutuhan Jalan Nasioanal, Propinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberi Kontribusi bukan Hanya di Kabupaten Buton akan tetapi dapat memberikan Kontribusi Devisa Negara oleh karena itu Sektor Pertambangan khususnya Aspal diharapkan Negara membentuk Kawasan Industri sehingga pengelolaan Aspal Buton dapat lebih

Terpusat dan Efektif mengingat Potensi ini tidak dimiliki di daerah Bahkan Negara Lain dengan Deposit Perkiraan sebesar 660.000.000 Juta Ton.

- **Laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor** mengalami penurunan di tahun 2024. Capain kinerja sektor ini sebesar 87,38%, yang diperoleh dari realisasi Laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 6,86 dibanding dengan target sebesar 7,85, sementara pada tahun 2023 sektor ini berada pada angka 8,45, sehingga dapat disimpulkan penurunan sektor ini cukup signifikan. Sektor ini sangat tergantung dengan faktor eksternal yaitu distribusi barang karena sebagian barang yang diperdagangkan bukanlah dari hasil prosuksi dalam Kabupaten Buton.

2) Sasaran 2 : Terkelolanya SDA berwawasan lingkungan

Peningkatan daya saing daerah yang kompetitif dan berwawasan lingkungan menjadi langkah yang tepat mengingat komoditas unggulan yang masih dapat ditingkatkan dan dikembangkan dengan maksimal, sehingga pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan lingkungan Kabupaten Buton. Dengan demikian pembangunan dapat dilaksanakan secara terpadu dan seimbang, tanpa merugikan ekosistem lingkungan sekitar**.** Guna mewujudkan daya saing daerah yang kompetitif dan berwawasan lingkungan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah Terpeliharanya kualitas lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Untuk mengukur sejauh mana Pencapaian kinerja sasaran maka digunakan indikator dengan target dan realisasi serta capaian seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 6
Capaian Kinerja Sasaran Terkelolanya SDA Berwawasaan Lingkungan

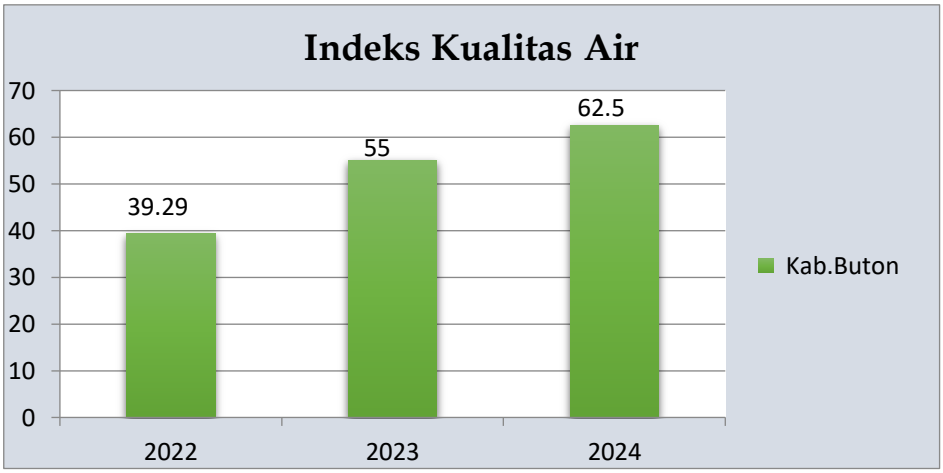
Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Indeks Kualitas Air	Nilai	53,45	62,5	116,93
2	Indeks Kualitas Udara	Nilai	87,48	94,99	108,58
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai	81,99	81,89	99,87
Capaian Kinerja Sasaran Strategis					**108,46 (Sangat Berhasil)**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tahun 2025

- **Indeks Kualitas Air (IKA)** merupakan ”manajemen tool” tidak dapat dijadikan pengganti satus mutu air, istilah khusunya menilai kualitas air dengan merujuk kepada baku mutu khusus yang ditetapkan untuk peruntukan tertentu yang digunakan dalam penetapan status mutu air. Rumusan indeks kualitas air digunakan untuk menyederhanakan data kualitas air yang komplek dalam satu infromasi yang mudah dipahami dan berguna untuk pengambilan kebijkan dalam analisis lingkungan. Indeks kualitas air juga digunakan sebagai sarana untuk mengevaluasi efektifitas program-program pengendalian pencemaran air, membantu perumusan kebijakan, membantu dalam mendisain program kulitas air dan mempermudah komunikasi dengan publik sehubungan dengan kondisi kualitas air. Indeks kualitas air menggunakan perhitungan Indeks pencemaran, di mana selama 3 (tiga) tahun terakhir terus mengalami peningkatan dan pada tahun 2024 Buton mencapai nilai 62,5 meskipun capaian ini sedikit lebih rendah dibanding nilai IKA Provinsi Sulawesi Tenggara yang berada pada angka 65,32. Indeks Kualitas Air Kabupaten Buton yang mencapai nilai 62,5 menunjukkan bahwa pencemaran di Kabupaten Buton masih dikatakan ringan, Hal tersebut didukung oleh Kondisi kualitas Sungai yang membaik diakibatkan oleh kurangnya efek

pencemaran kualitas air sungai. Untuk meningkatkan Indeks Kualutas air maka dilakukan upaya-upaya diantaranya restorasi Sungai di delapan sampel Sungai yang menjadi prioritas pemantauan dari segi perencanaan dan penganggaran.

Grafik 3. 3
Trend Indeks Kualitas Air Kabupaten Buton

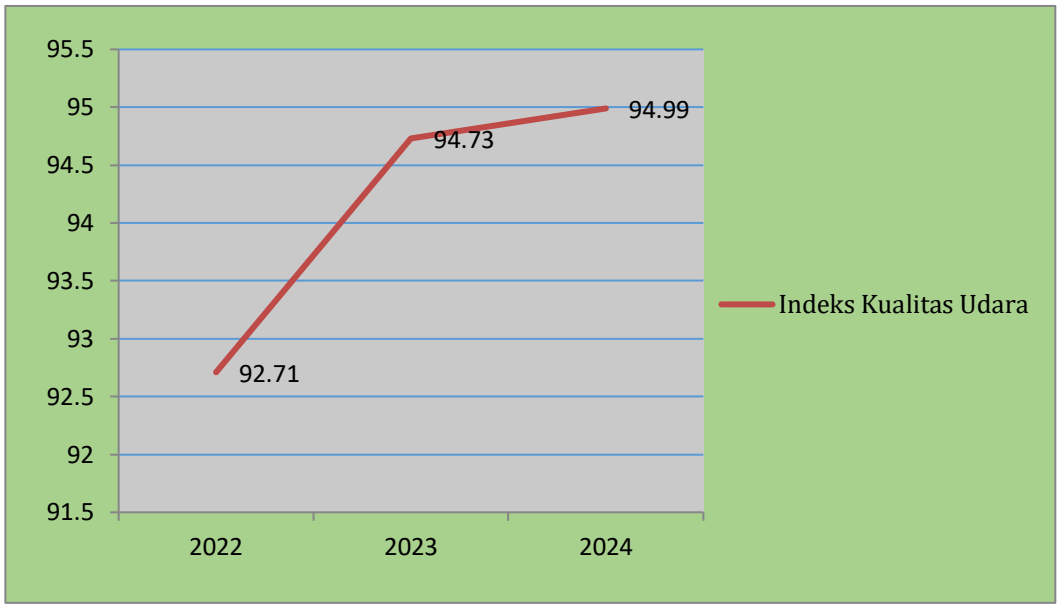


Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab.Buton Tahun 2025

- **Indeks Kualitas Udara** merupakan alat ukur sederhana berupa angka untuk menginformasikan kualtas udara ambien suatu daerah. Indeks kualitas udara diperoleh dari pengolahan data hasil pemantauan kualitas udara. Yang di maksud dengan udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang dibutuhkan dan berpengaruh pada kesehatan mahkluk hidup, termasuk manusia, dan unsur lingkungan hidup lainnya. Tujuannya agar memberikan kemudahan dari keseragaman infromasi mutu udara ambien kepada masyarakat di lokasi dan waktu tertentu serta sebagian bahan pertimbangan dalam melakukan upaya-upaya pengendalian pencemaran udara, baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Indeks kualitas udara di Kabupaten Buton selama kurun waktu 3 tahun terakhir terus meningkat dimana pada tahun 2024 indeks kualitas udara Kabupaten Buton mencapai 94,99 dari angka 94,73 di Tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa

pencemaran udara sedang, hal ini didukung oleh faktor Kondisi kualitas udara yang membaik di titik pantau.

Grafik 3. 4
Trend Indeks Kualitas Udara Kabupaten Buton



Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup Kab.Buton Tahun 2025

- **Indeks Kualitas Tutupan Lahan** didefinisikan suatu alat ukur yang mengukur tingkat kualitas penutupan lahan dalam suatu wilayah. Indeks kualitas tutupan lahan dibuat dengan mempertimbangkan beberapa fakror seperti tipe dan luas dari tutupan lahan, stabilitas ekosistem, dan tingkat degrasi lahan. Indeks kualitas tutupan lahan di kabupaten buton selama kurun waktu 3 (tahun) terakhir cukup fluktuatif, dimana tahun 2022 IKTL Kab.Buton berada pada angka 80,92 selanjutnya pada tahun 2023 mengalami peningkatan pada angka 82,13 dan tahun 2024 mengalami penurunan hingga mencapai angka 81,89. Dengan realisasi diangka 81, rentang $70 \leq x \leq 90$ di kategorikankan Baik. Meningkatnya capaian ini dipengaruhi oleh pemantauan secara terus menurus di wilayah yang ditetapkan sebagai lokasi perhitungan indeks. Guna meningkatkan capaian Indeks kualitas tutupan lahan maka dilakukan upaya-

upaya diantaranya menambah titip pengimputan luas tutupan lahan seperti RTH dan tutupan vegetasi lainya di aplikasi IKLH.

3) Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan

Pendidikan memegang peranan kunci dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga sangat menentukan berhasil atau gagalnya pembangunan yang dilakukan pada suatu daerah. Di samping terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kualitas kesehatan juga perlu menjadi perhatian semua pihak dengan mengarahkan pada mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Untuk mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan, maka digunakan indikator-indikator dengan target, realisasi dan capaian sebagai berikut:

Tabel 3. 7
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Angka harapan lama sekolah	Tahun	13,79	13,89	100,72
2	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,53	8,63	101,17
3	Angka harapan hidup	Tahun	69,58	70,47	101,27
Capaian Kinerja Sasaran Strategis					**101,05 (sangat Berhasil)**

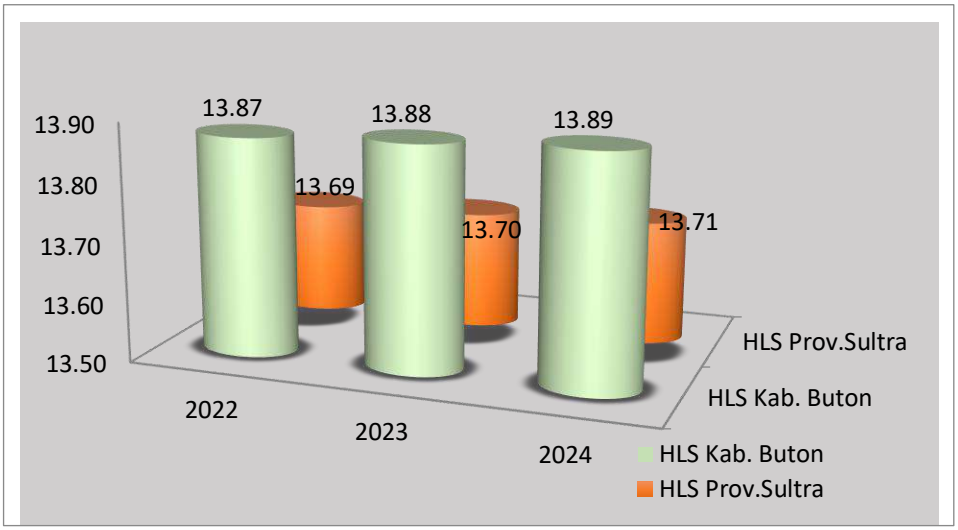
Sumber : BPS dan OPD Kab.Buton Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan capaian kinerja rata-rata sasaran strategis sebesar 101,41% atau Kategori Sangat Berhasil dengan jumlah indikator sebanyak 3 buah yaitu Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Angka Harapan Hidup.

- **Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)** didefinisikan sebagai Lamanya Sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

  Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Buton terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun dengan angka yang tidak begitu signifikan. Pada tahun 2022 angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Buton sebesar 13,87, kemudian di tahun 2023 meningkat menjadi 13,88 dan di tahun 2024 kembali meningkat di angka 13,89. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,89 tahun atau setara dengan Diploma II. Jika dibandingkan dengan Angka Harapan Lama Sekolah untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton sedikit lebih tinggi dimana untuk Provinsi Sultra HLS berada di angka 13,71 pada tahun 2024. Capaian Kinerja sasaran indikator ini mencapai 100,72 % dan diproyeksikan terus meningkat seiring perhatian serius pada sektor pendidikan. Berikut Trend Harapan Lama Sekolah Kab. Buton selama kurun waktu 3 (tiga) Tahun jika disandingkan dengan HLS Prov.Sultra :

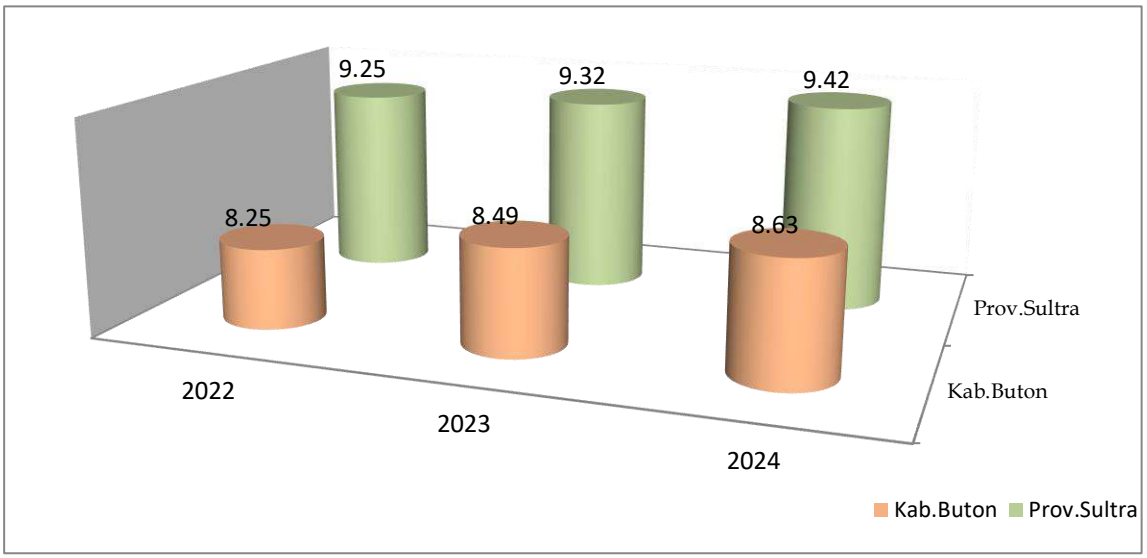
Grafik 3. 5
Trend Harapan Lama Sekolah Kab. Buton dan Prov.Sultra
Tahun 2022-2024



Sumber data : https://sultra.bps.go.id, 2025

- **Rata-rata lama sekolah**, capaian kinerjanya sebesar 101,17%. Angka tersebut diperoleh dari realisasi sebesar 8,63 dibandingkan dengan target kinerja sebesar 8,53. Artinya, secara rata-rata penduduk yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,63 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII. Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Buton terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun dengan angka yang tidak begitu signifikan. Pada tahun 2022 angka rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Buton sebesar 8,25, kemudian di tahun 2023 meningkat menjadi 8,49 dan di tahun 2024 kembali meningkat di angka 8,63. Namun demikin rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Buton masih di bawah Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana rata-rata Lama Sekolah Prov.Sultra pada tahun 2024 mencapai 9,42. Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Berikut Trend Rata-rata Lama Sekolah Kab. Buton selama kurun waktu 3 (tiga) Tahun jika disandingkan dengan Rata-Rata Lama Sekolah Prov.Sultra:

Grafik 3. 6
Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Lama Sekolah Kab. Buton terhadap Prov.Sultra Tahun 2022-2024



Sumber data : https://sultra.bps.go.id, 2025

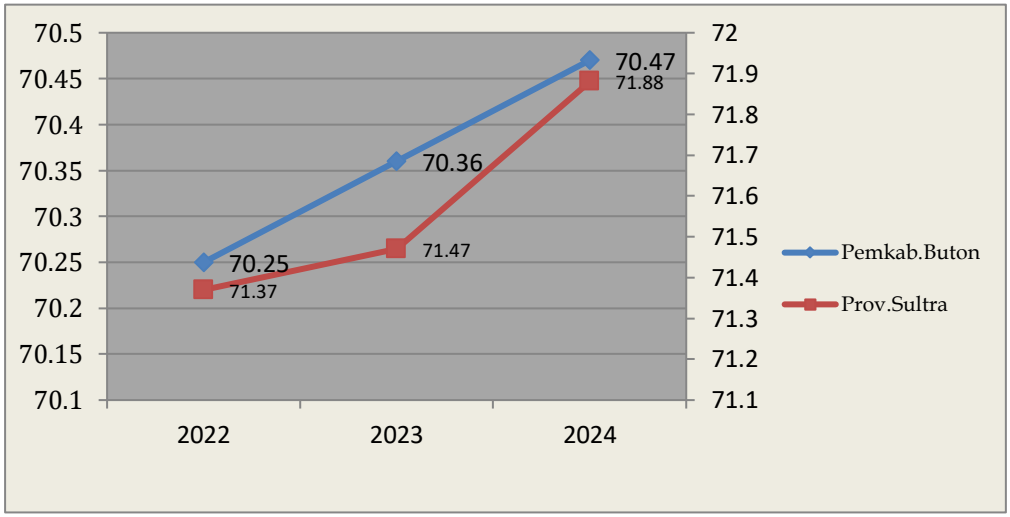
Meningkatnya capaian Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata lama sekolah (RLS) dipengaruhi oleh adanya intervensi kebijakan Pemerintah diantaranya; Pelatihan dan Sertifikasi Guru; Tunjangan Tambahan untuk Guru; Infrastruktur Pendidikan yang Memadai; dan Sosialisasi Program Pendidikan:

- **Angka Harapan Hidup**, didefisikan sebagai rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakat. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

  Angka harapan hidup di Kabupaten Buton kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir menunjukan trend positif dimana pada tahun 2022 Angka Harapan Hidup Kab.Buton berada pada angka 68,46, kemudian pada tahun mengalami kenaikan menjadi 70,36 dan pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 70,47. Meskipun angka tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan

rata-rata angka Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara yang mencapai 71,88 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran akan pola hidup sehat dan daya dukung lingkungan fisik di Kabupaten Buton sangat besar bagi ekosistem yang sehat. Peningkatan UHH ini sebagai dampak makin membaiknya pelayanan kesehatan masyarakat terutama untuk pelayanan SPM yang menjadi prioritas pemerintah daerah. Berikut Perbandingan Angka Harapan Hidup Kab. Buton Terhadap Angka Harapan Hidup Prov.Sultra selama kurun waktu 3 (tiga) Tahun terakhir:

Grafik 3. 7
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kab. Buton Terhadap Angka Harapan Hidup Prov.Sultra Tahun 2022-2024



Sumber data : https://sultra.bps.go.id, 2025

Meningkatnya Angka Harapan Hidup di Kabupaten Buton didukung oleh adanya intervensi kebijakan oleh Pemerintah diantaranya:

1. Screening Hipotiroid kongenital dalam upaya untuk mengetahui potensi kelainan hipotiroid yang bisa menyebabkan kecacatan fisik dan intelektual pada anak di kemudian hari.
2. Screening Penyakit Jantung Bawaan (PJB) pada bayi baru lahir
3. Screening Triple Eliminasi (HIV,Sifilis dan HIV) pada ibu hamil serta kunjungan rumah pada ibu hamil dalam ibu nifas.

4. Serta distribusi USG ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan guna screening dini pada ibu hamil dalam upaya penurunan masalah kehamilan dan bayi.

4) Sasaran 4 : Menurunnya angka kemiskinan daerah

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada alinea keempat mengamanatkan bahwa pemerintahan negara Republik Indonesia ini dibentuk untuk: 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2) memajukan kesejahteraan umum; 3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Implementasi dari amanah tersebut sudah tertuang pada dokumen RPD Kabupaten Buton, tertuang pada Misi kedua ”Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas” dengan tujuan Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk mewujudkan sasaran Menurunnya angka kemiskinan daerah maka ditetapkan indikator beserta target dan realisasi serta capaian berikut :

Tabel 3. 8
Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan Daerah

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Angka kemiskinan	%	12,82	14,41	87,59
2	Pendapatan perkapita	Juta rupiah	28,90	43,41	150,20
3	Pengeluaran Perkapita	Ribu rupiah	7.375	8.401	113,91
4	Gini ratio	Nilai	0,33	0,328	100,60
5	Tingkat Pengganguran Terbuka	%	3,97	2,95	125,69
Capaian Kinerja Sasaran Strategis					**115,59 (Sangat Berhasil)**

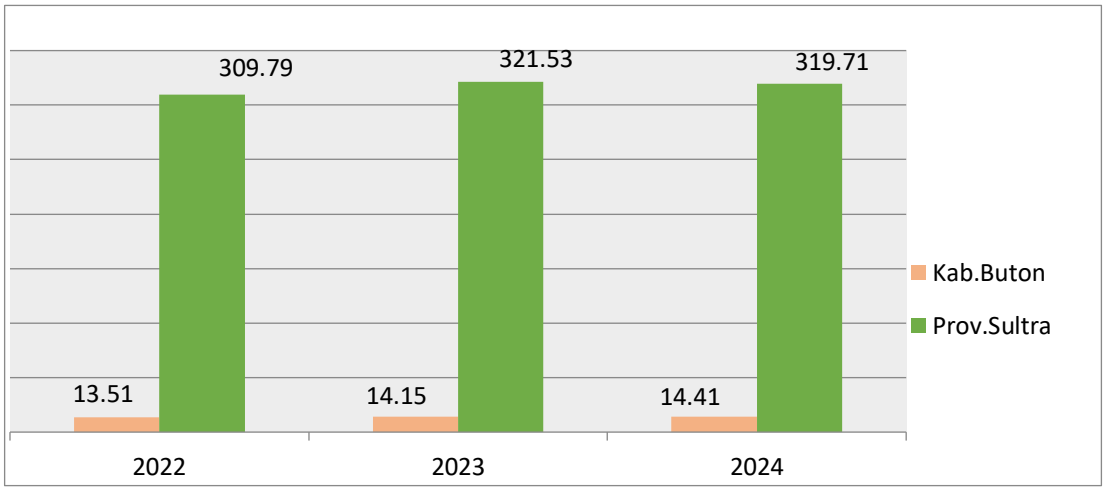
Sumber data: BPS Kab.Buton, Buton Dalam Angka 2025

- **Angka Kemiskinan,** untuk mengukur tingkat kemiskinan Badan Pusat Statitik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan Kabupaten Buton terus mengalami kenaikan selama kurun waktu 3(tiga) tahun terakhir, dimana Tahun 2022 mencapai 13,61%, kemudian di tahun 2023 mengalami kenaikan mencapai 14,51% dan pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 14,41. Namun angka ini masih jauh dibawah Angka Kemiskinan tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana pada tahun 2024 mencapai angka 319,17. Pemerintah Kab.Buton melakukan percepatan penghapusan kemiskinan secara tepat sasaran melaui strategi kebijakan yang meliputi :

  a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
  b. Peningkatan pendapatan masyarakat;
  c. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
  d. Intervensi kegitan lintas sektor baik melalui pendanaan daerah, propinsi maupun pusat.

  Dengan Program kegiatan yang saling terintegrasi akan mampu memberikan kontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Buton. Berikut Perbandingan Angka Kemiskinan Kab. Buton Terhadap Angka Kemiskinan Prov.Sultra selama kurun waktu 3 (tiga) Tahun terakhir:

Grafik 3. 8
Perbandingan Tingkat Kemiskinan di Kab. Buton
Terhadap Tingkat Kemiskinan Prov.Sultra
Tahun 2022-2024



Sumber data : https://sultra.bps.go.id,2025 dan BPS Kab.Buton, Buton Dalam Angka 2025

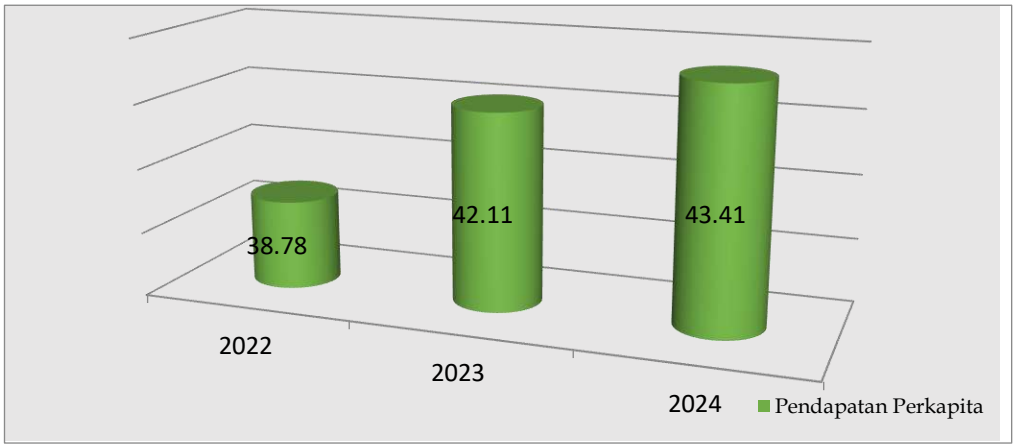
Isu kemiskinan memiliki porsi perhatian yang cukup besar dalam pembangunan, hal tersebut diindikasikan dari beragamnya program pengentasan kemiskinan dalam berbagai level. Pada tingkat pemerintahan kabupaten/kota, Kabupaten Buton telah melaksanakan berbagai program penanganan kemiskinan yang dibiayai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, seperti JAMKESMAS, BOS, PKH dan RASKIN, Beasiswa, Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan program lainnya.

- **Pendapatan Perkapita,** PDRB per kapita secara relatif menggambarkan rata-rata pendapatan penduduk suatu daerah. PDRB Perkapita diperoleh dari hasil pembagian pendapatan suatu daerah dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun di daerah tersebut.Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah, semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur daerah tersebut. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada

potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Capaian kinerja **pendapatan perkapita** Kabupaten Buton dalam kurun waktu 3 tahun (2022-2024) terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 pendapatan perkapita Kab.Buton berada pada angka 38,78, kemudian di tahun 2023 meningkat sebesar 42,11, selanjutnya pada tahun 2024 pendapatan kabupaten buton kembali mengalami kenaikan sebesar 43,41. Diharapkan pendapatan perkapita ini kan terus membaik mengingat trand sudah mulai memberikan kenaikan yang positif. Perkembangan Trend Pendapatan Perkapita dapat dilihat pada Grafik Berikut :

Grafik 3. 9
Trend Pendapatan Perkapita di Kabupaten Buton Tahun 2022-2024

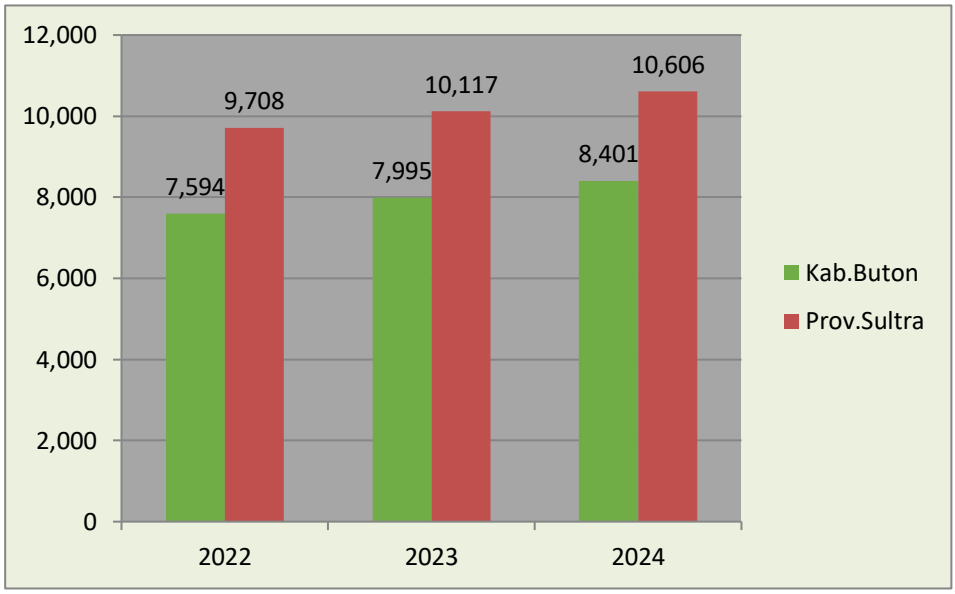


Sumber : BPS Kab.Buton, Buton Dalam Angka Tahun 2025

- **Pengeluaran Perkapita,** adalah biaya dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga. Kinerja pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Buton, terjadi tren kenaikan moderat selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Tingkat konsumsi menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Angka pengeluaran perkapita penduduk tahun 2022 sebesar Rp. 7.594 juta rupiah, pada tahun 2023 meningkat menjadi 7.995 juta rupiah dan kembali meningkat pada tahun 2024 yang mencapai

8.401 juta rupiah. Namun demikian pengeluaran perkapita kabupaten Buton masih jauh di bawah Provinsi Sulawei Tenggara yang mencapai 10.606 juta rupiah di tahun 2024. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Grafik 3. 10
Perbandingan Pengeluaran Perkapita di Kab. Buton
Terhadap Pengeluaran Perkapita Prov.Sultra Tahun 2022-2024

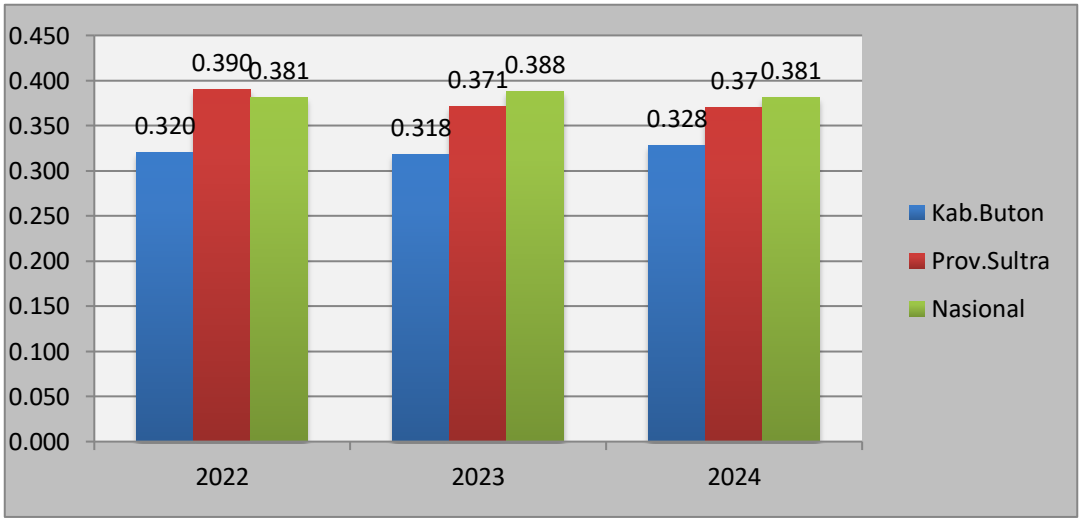


Sumber data : https://sultra.bps.go.id,2025

- **Gini Ratio** merupakan gambaran pemerataan dan ketimpangan secara keseluruhan, mulai dari pendapatan hingga distribusi. Ketimpangan ekonomi ataupun distribusi pendapatan yang diukur dengan gini ratio ini mampu menghasilkan nilai koefisien yang bersikar dari 0 (0%) sampai 1 (100%). Nilai 0 menggambarkan adanya kesetaraan yang sempurna sedangkan nilai 1 menggambarkan ketidaksempurnaan. Artinya bila sebuah Negara mempunyai gini ratio bernilai 0 maka distribusi pendapatan penduduk yang ada dalam Negara tersebut.

Perkembangan indeks Gini Ratio Kabupaten Buton kurun waktu 3 tahun (2022-2024) cukup fluktatif atau turun naik dari tahun ketahun. Pada tahun 2022 Gini Ratio Kabupaten Buton berada pada angka 0,320, kemudian pada tahun 2023 turun menjadi 0,318, dan terakhir di tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 0,328. kenaikkan gini ratio ini disebabkan oleh pertumbuhan pengeluaran masyarakat kelompok atas yang lebih pesat dibanding pertumbuhan pengeluaran kelompok lain. Namun keadaan ini jauh dibawah rata-rata gini ratio Sulawesi tenggara dan Nasional. Rata-rata gini ratio Kabupaten Buton sebesar 0,328 sedangkan rata-rata gini ratio provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional masing- masing sebesar 0,370 dan 0,381.

Grafik 3. 11
Gini Ratio Nasional, Prov Sultra, Kabupaten Buton Tahun 2022-2024



Sumber data : https://sultra.bps.go.id,2025

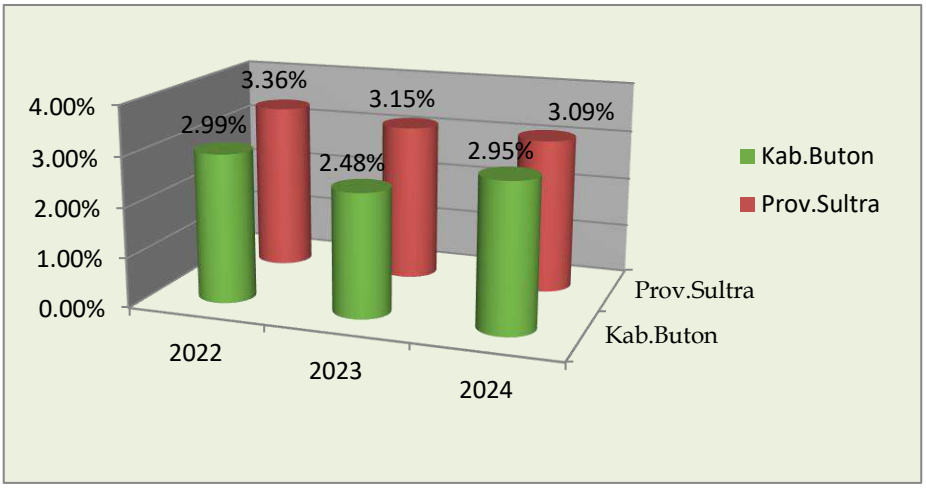
- **Tingkat Pengangguran Terbuka**, Angkatan kerja yang bertambah harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja, sehingga dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Untuk menilai kesempatan kerja,

dapat dilihat dari beberapa indikator, salah satunya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan melihat tingkat pengangguran terbuka, secara langsung dapat mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Dalam lingkup Kabupaten Buton, TPT dalam kurun waktu 3 tahun mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2023 TPT kabupaten Buton menurun dari Tahun 2022 yakni dari 2,99 turun menjadi 2,48 di tahun 2023. Namun pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 2,95. Secara umum TPT Kabupaten Buton lebih rendah jika dibandingkan TPT di Provinsi Sulawesi Tenggara yakni 3,09 pada agustus pada tahun 2024. Untuk menurunkan TPT di Kabupaten Buton, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya diantaranya:

1. Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja sebanyak 3 paket (menjahit, otomotif, TIK).
2. Pemberian bantuan saranan usaha kepada peserta pelatihan keja, untuk membuka usaha secara mandiri.
3. Pemberdayaan UMKM, petani, nelayan melalui pemberian bantuan sarana dan pra sarana produksi.
4. Melakukan kerja sama dengan KADIN Buton dalam rangka pengembangan usaha hasil perikanan
5. Membantu pencari kerja untuk mendapatkan bantuan (Tenaga Kerja Mandiri) pemula TKMP dari Kementerian Tenaga Kerja.
6. Pelayanan pembuatan kartu AK1/Kartu Pencari Kerja.

Berikut Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Buton Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Prov.Sultra selama kurun waktu 3 (tiga) Tahun terakhir:

Grafik 3. 12
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab.Buton Terhadap TPT Prov. Sultra Tahun 2022-2024



Sumber data : https://sultra.bps.go.id,2025 dan BPS Kab.Buton, Buton Dalam Angka 2025

5) Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas anak, perempuan, pemuda dan olahraga

Untuk membangun sumber daya manusia yang merata dan berkualitas, dibutuhkan adanya partisipasi gender dalam pembangunan. Dengan adanya partisipasi gender ini diharapkan pembangunan akan berjalan dengan lebih baik. Partisipasi gender ini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama antara kaum perempuan dan laki-laki untuk melakukan hal-hal yang produktif. Selain pemberdayaan gender juga diperlukan pemberdayaan pemuda dan olahraga yang diarahkan pada pengelolaan pembangunan SDM yang berkualitas, berkompeten dan profesional, peduli dan tanggap terhadap tuntutan inspirasi, partisipasi serta memiliki ketahanan fisik dan mental yang sehat dan bugar, serta berbagai perilaku yang positif.

Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas anak, perempuan, pemuda dan olahraga, ditetapkan indikator sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut:

Tabel 3. 9
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan, Pemuda dan Olahraga

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Kategori kabupaten layak anak	Nilai	350,00	745	212,85
2	Indeks pembangunan gender	%	81,22	82,07	101,04
3	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan	%	98,51	10,71	10,87
4	Persentase cabang olaraga yang terseleksi mengikuti event olaraga daerah, regional dan nasional	%	100	8,82	8,82
Capaian Kinerja Sasaran Strategis					**83,39 (Berhasil)**

Sumber : OPD Kab.Buton Tahun 2025

- **Kategori kabupaten layak anak**, merupakan system pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Pada tahun 2024 Kabupaten Buton mendapatkan nilai 745 dari target sebesar 350,00 untuk kategori Kabupaten Layak Anak, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 212,85%. Realisasi tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya sebesar 435,62. Meningkatnya Nilai Kabupaten Layak anak menjadikan Kabupaten Buton Masuk dalam Kategori Pratama, dimana dalam hasil penilaian Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA) terdiri dari 5 tingkat, yaitu: Pratama, Madya, Nindya, Utama, Kabupaten/Kota Layak Anak.

  Penilaian KLA dilakukan berdasarkan 24 indikator yang terbagi dalam 5 klaster. Ke-5 klaster tersebut adalah, Klaster hak sipil dan kebebasan, Klaster

lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, Klaster Perlindungan Khusus Anak. Meningkatnya Nilai Kabupaten Layak anak untuk Kabupaten Buton didukung oleh tersedianya beberapa dokumen pendukung yang menjadi indikator penilaian, yaitu:

1. SK Sekolah Rama Anak tingkat SMA di Kecamatan pasarwajo, Kecamatan wabula dan kecamatan Wolowa, Tingkat SMP dan SD di kecamatan Pasarwajo, Wolowa, Siontapina.
2. SK Puskesamas Rama Anak Dikecamatan Pasarwajo, Kecamatan Wabula dan Kecamatan Siotapina.
3. SK Forum Anak Kabupaten.
4. Sk Forum Anak Kecamatan
5. SK Forum Anak Desa/ Kelurahan,
6. SK Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

MOU dengan pengadilan Agama Tentang layanan Konseling bagi Orang Tua dan Anak Pemohon Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Buton melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak terus berupaya meningkatkan status kabupaten layak Anak melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Membuat regulasi percepatan kabupaten layak anak.
2. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, non pemerintah, media dan dunia usaha dan masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak anak guna tercapainya target kabupaten layak anak.
3. Mengoptimalkan kinerja Gugus Tugas Kota Layak Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing anggota.
4. Memfasilitasi forum anak kabupaten, kecamatan desa dan kelurahan sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan hak-hak anak di Kabupaten Buton.

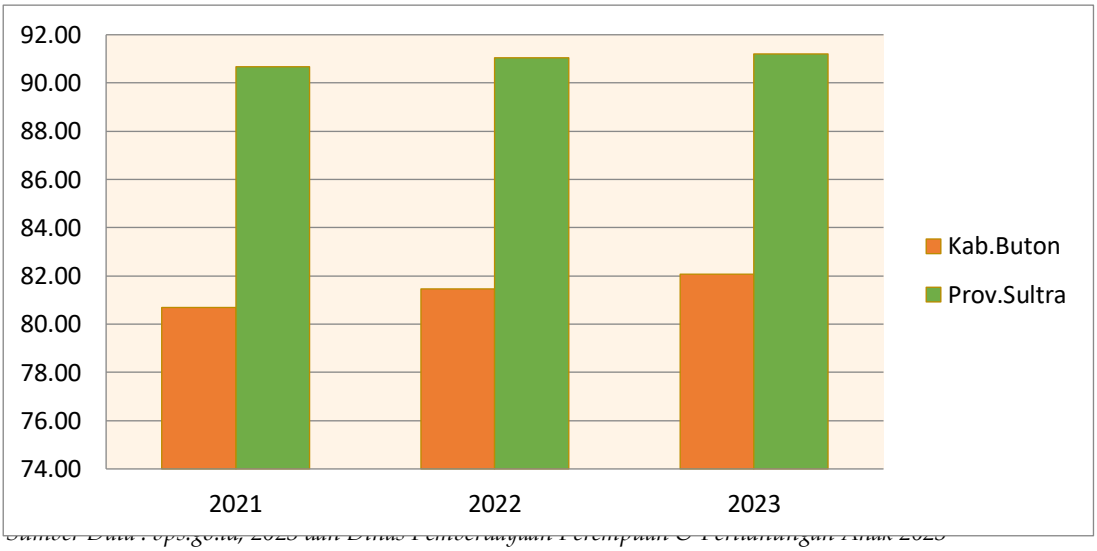
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Buton pada tahun 2024, capaian kinerjanya sebesar 101,04. Capaian tersebut diperoleh dari nilai Indeks Pembangunan Gender Kab.Buton sebesar 82,07 dibandingkan dengan target kinerja IPG sebesar 81,22. Namun nilai IPG yang sebeser 82,07masih merupakan nilai pada tahun 2023, sebab hasil penilaian IPG Tahun 2024 baru akan dirilis pada pertengahan tahun 2024.

Indeks Pembangunan Gender itu sendiri merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang responsif gender sesuai PERDA No 8 tahun 2008, telah menggarisbawahi bahwa salah satu trategi pembangunan Kabupaten Buton adalah pendekatan 'gender mainstreaming' atau pengarusutamaan gender (PUG) yaitu gambaran yang memperlihatkan perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki.

Secara teknis, angka IPG menunjukkan rasio antara pembangunan perempuan dan pembangunan laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. Sebaliknya, semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara lakilaki dengan perempuan. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna. Mengacu pada rumus baru perhitungan IPG, setiap tahunnya angka IPG Kabupaten Buton cenderung mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2021 IPG Kab. Buton berada diangka 80.69 dan mengalami kenaikan ditahun 2022 mencapai 81.46, dan pada tahun 2023 kembali meningkat di angka 82,07. Namun demikian angka ini masih berada jauh di bawah Indeks Pembangunan Gender Provinsi Sultra

yang berada di angka 91,20 pada tahun 2023. Berikut Grafik Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Buton terhadap Indeks Pembangunan Gender Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun:

Grafik 3. 13
Trend Tingkat Tingkat IPG Kab. Buton Terhadap IPG Prov Sultra
Tahun 2021-2023



Sumber: Data Pepsigda, 2023 dan Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak 2023

Pemerintah Kabupaten Buton melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak terus berupaya meningkatkan Indeks Pembangunan Gender melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Membuat regulasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah guna terlaksananya Pengarusutamaan Gender di daerah sehingga hasil pembangunan di Kabupaten Buton dapat dinikmati semua lapisan masyarakat baik laki-laki, perempuan, kaum disabilitas lansia maupun anak-anak.
2. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, non pemerintah, media dan dunia usaha dan masyarakat tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang, sehingga pembangunan manusia laki-laki dan pembangunan perempuan

mengalami peningkatan guna tercapainya kesetaran dan keadilan gender di Kabupaten Buton.

3. Mengoptimalkan kinerja POKJA Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah.

- **Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan** di Kabupaten Buton pada Tahun 2024 capaian kinerjanya sebesar 10,87%. Capaian tersebut diperoleh dari realisasi sebesar 10,71% dibandingkan dengan target kinerja sebesar 98,51%. Untuk Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial diperoleh melalui perbandingan antara jumlah pemuda (usia 16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten Buton dengan jumlah keseluruhan pemuda (usia 16-30) di Kabupaten Buton, seperti yang tergambar pada rumus di bawah ini:

$$\frac{\text{Jumlah pemuda (usia } 16-30 \text{ tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kab. Buton}}{\text{Jumlah keseluruhan pemuda (usia } 16-30) \text{ di Kab Buton}} \times 100\% = \frac{2.178}{20.338} \times 100\% = 10{,}71$$

Keterangan :

- Yang dimaksud dengan organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
- Organisasi kepemudaan sekurang-kurangnya memiliki : keanggotaan, kepengurusan, tata laksana kesekretariatan dan keuangan dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- Organisasi sosial kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila.

- Jumlah pemuda 16-30 tahun berdasarkan data kependudukan yang terdaftar pada SIAK.
- Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Capaian partisipasi Pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan sangat ditentukan oleh wadah Organisasi pengembangan potensi pemuda. Factor yang mempengaruhi Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam wadah organisasi kepemudaan lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah anak usia muda hal ini disebabkan kurangnya partisipasi pemuda dalam organisasi salah satu faktornya adalah tidak adanya kesamaan aspirasi, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Untuk meningkatkan partisipasi Pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan maka Pemerintah akan melaksanakan kegiatan kepemudaan yang berkaitan dengan kegiatan sosial kemasyarakatan serta pengembangan pemuda berwirasusaha, penguatan pemuda pelopor serta pemuda bela negara yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan sehingga akan meningkatkan partisipasi Pemuda dalam organisasi sesuai dengan kepentingan dan tujuan organisasi.

- **Persentase cabang olahraga yang terseleksi mengikuti event olahraga daerah, regional dan nasional** untuk Kabupaten Buton pada tahun 2024 capaian kinerjanya sebesar 8,82%. Capaian tersebut diperoleh dari realisasi sebesar 8,82% dibandingkan dengan target kinerja sebesar 100%. Realisasi tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah cabang olahraga yang dibina sebanyak 34 cabang olahraga dengan cabang olahraga yang diikutkan dalam event sebanyak dengan cabang olahraga diikutkan pada event POPDA sebanyak 2 cabor dan Gubernur Cup Cabor Futsal.

  Pelaksanaan Event olahraga oleh daerah diagendakan melalui Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) yang dilaksanakan 2 tahun sekali dan Pekan Olahraga Propinsi (PORPROV) 4 tahun sekali menyebabkan minimnya pelaksanaan

event per tahun serta terbatasnya kegiatan event regional dan kemampuan daya saing auntuk berkompetisi di tingkat nasional menyebabkan faktor minimnya persentase cabor yang terseleksi untuk berkompetisi di event-event olahraga baik di tingkat regional maupun nasional.

Untuk meningkatkan capaian target kinerja maka yang dilaksanakan adalah melakukan intensitas event event olahraga di daerah baik sasaran pelajar maupun terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara konsisten sehingga akan mendorong atlit untuk berkompetisi dan mengembangkan kemampuan secara terukur.

6) Sasaran 6 : Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean governance), baik (good governance), berkualitas dan bertanggung jawab menjadi kunci tercapainya pemerintahan yang berkualitas. Pemerintahan yang bersih, baik dan berkualitas akan memberikan dampak pada pelayanan terhadap masyarakat. Untuk mewujudkan meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah maka ditetapkan indikator kinerja beserta target, realisasi dan capaian sebagai berikut:

Tabel 3. 10
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Nilai Sakip Kabupaten	Nilai	71	63,52	89,43
2	Opini BPK	Kategori	WTP	WTP	100
3	Indeks kepuasan masyarakat	%	25	91,10	364,4
Capaian Kinerja Sasaran Strategis					**184,61 (Sangat Berhasil)**

Sumber : OPD Kab.Buton Tahun 2025

- **Nilai Sakip Kabupaten Buton** pada tahun 2024 memperoleh capaian kinerja sebesar 89,43%. Capaian ini diperoleh dari nilai hasil Sakip Kabupaten Buton sebesar 63,52 (B) dibandingkan dengan target kinerja sebesar 71 (B). Capaian kinerja nilai SAKIP menunjukkan kenaikan yang baik selama tahun 2022 – 2024, meskipun masih pada kategori yang sama namun nilai SAKIP pada tahun 2024 kembali meningkat dari capaian tahun 2023 yang hanya sebesar 63,15, dan nilai ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan perolehan nilai Sakip Prov.Sultra sebesar 65,71 pada tahun 2024.

  Berbagai kebijakan peningkatan nilai SAKIP terus dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan perencanaan dan efektifitas pemilihan program dan kegiatan yang benar-benar mendukung kinerja sasaran strategis. Selain itu, berbagai kegiatan dan dokumen pendukung untuk meningkatkan kualitas SAKIP terus dilakukan diantaranya menyusun Road Map Reformasi Birokrasi, melakukan review SOP, peningkatan kompetensi tim penyusun SAKIP perangkat daerah, dan menyusun Proses Bisnis Internal pemerintahan. Pemerintah daerah berharap dengan pembenahan hasil rekomendasi penilaian dari Tim Evaluasi Kemenpan RB dapat meningkaatakan nilai predikat di tahun berikutnya, dengan harapan kategori ini mendapat penghargaan atas penilaian kinerja Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Kemenpan RB Republik Indonesia sebagai lembaga yang menilai kinerja Pemerintah daerah.

Penilaian Komponen SAKIP Tahun 2024

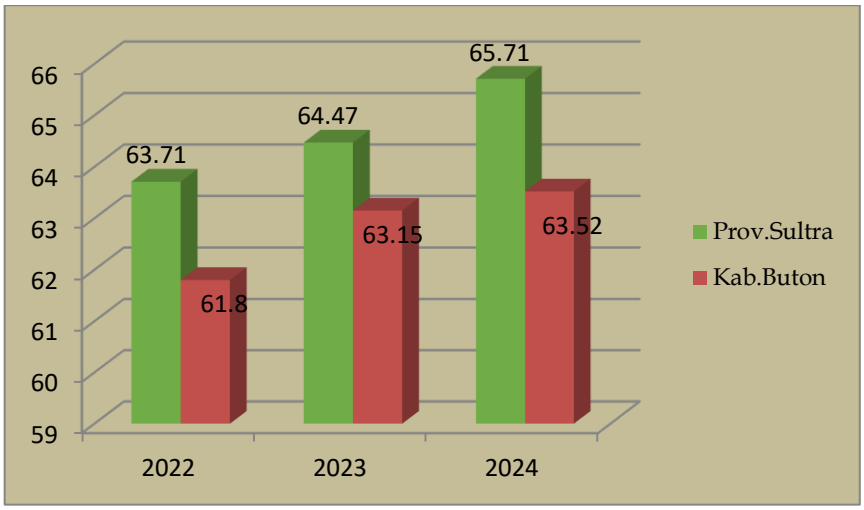
No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2024	2023	2024
a.	Perencanaan Kineria	30	22,18	22,18
b.	Pengukuran Kinerja	30	17,19	17,56
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,98	10,98

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2024	2023	2024
d.	Evaluasi Akuntabilitas Internal	25	12,80	12,80
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**63,15**	**63,52**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**	**B**

Sumber : Hasil Evaluasi Kemenpan RB Tahun 2024

Sementara untuk perbandingan nilai Sakip Kab.Buton terhadap Nilai Sakip Prov.Sultra kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3. 14
Perbandingan Nilai Sakip Kab.Buton Terhadap Nilai Sakip Prov.Sultra



Sumber : Hasil Evaluasi Kemenpan RB, 2024

- **Opini BPK,** pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Buton kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk Tahun Anggaran 2023. Capaian ini terus konsisten sejak pertama kali mendapatkan WTP di tahun 2013. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan

pengawasan keuangan daerah. Pengelolaaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan. Penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan pembangunan daerah. Saat ini Kabupaten Buton berusaha untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dengan memberlakukan sistem transparansi anggaran serta berusaha menjaga kekonsisten terhadap perencanaan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPD 2023-2026). Dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dapat ditingkatkan dengan berusaha mengefektifkan sumber-sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Buton. PAD diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap APBD sehingga pendapatan daerah meningkat. Tingkat efektivitas dari penerimaan daerah secara keseluruhan akan bermuara kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat sehingga menimbulkan kemauan dari masyarakat untuk membayar kewajibannya kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk pajak dan retribusi.

- **Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)** Pemerintah Kabupaten Buton pada tahun 2024 capaian kinerjanya sebesar, capaian kinerjanya 364,4%. Capaian tersebut diperoleh dari realisasi nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat Tahun 2024 sebesar 91,10 (sangat baik) dibandingkan dengan target kinerja sebesar 25. Tingginya capaiannya ini disebabkan oleh rendahnya target kinerja yang ditetapkan sehingga perlu dilakukan review/perbaikan terhadap target kinerja indikator sasaran. Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) Pemkab.Buton selama 3 (tiga) Tahun terakhir cukup fluktuatif. Pada tahun 2022 nilai IKM Pemkab.Buton berada pada angka 89,90, selanjutnya pada tahun 2023 mengalami penurunan sebsar 1,35% menjadi 88,68, dan pada tahun 2024 IKM

Pemkab.Buton meningkat cukup signifikan diangka 91,10. Nilai IKM Pemkab.Buton diperoleh dari rekapitulasi nilai Survey Kepuasaan Masyarakat 7 (tujuh) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Kab.Buton, yakni Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Sosial, dan Puskesmas Wakaokili, Puskesmas Pasarwajo, dan Kecamatan Pasarwajo.

Berdasarkan hasil rekapitulasi Laporan SKM atas Pelayanan Publik Perangkat Daerah/Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton tersebut, selain terdapat Nilai Sangat Baik dan Baik, akan tetapi masih adanya nilai persepsi Kurang Baik, sebagian besar dikarenakan lemahnya pada unsur "waktu pelayanan", "Sarana dan Prasarana", dan "Produk/spesifikasi Jenis pelayanan."

Terkait unsur "waktu pelayanan" dan "Produk/spesifikasi Jenis pelayanan" hal ini bisa dikarenakan:

- alur/mekanisme pelayanan yang "berlapis";
- petugas pelayanan itu sendiri yang terkesan lamban memberikan pelayanan;dan
- Kurangnya Sosialisasi tentang Produk/spesifikasi Jenis pelayanan.

Terkait dengan nilai yang masih kurang baik untuk unsur "Sarana dan Prasarana" :

- Gedung Unit Layanan yang sempit dan berbagi dengan unit kerja yang lain.
- Kurangnya Sarana dan Prasarana Bagi kelompok rentan/difabel.
- Kurangnya tempat bermain anak.
- Tempat duduk antrian yang masih kurang

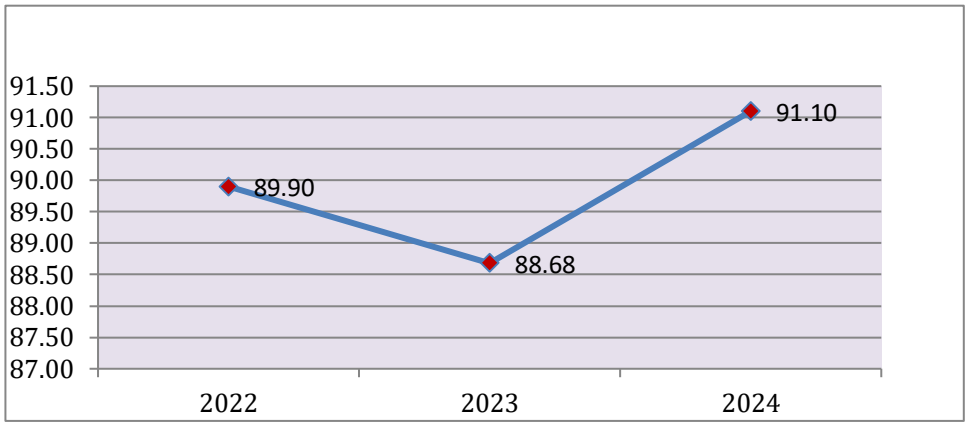
Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten ini merupakan cerminan persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Buton yang dapat menjadi referensi atau masukan bagi Unit

Pelayanan dan pihak terkait dalam upaya memperbaiki kualitas pelayanan, sehingga rencana perbaikan yang akan dirumuskan benar-benar mencapai sasaran yang diinginkan masyarakat pengguna pelayanan publik. . Pemerintah Kabupaten Buton senantiasa berusaha meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat melalui Perangkat Daerah dan unit pelayanan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton melalui perbaikan kualitas pelayanan publik ke depan secara bertahap, antara lain:

1. Pencermatan kebutuhan dan harapan masyarakat dari unsur pelayanan yang masih mendapat persepsi kepuasan rendah atau dibawah rata-rata, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dapat lebih baik lagi;
2. Terkait unsur "waktu pelayanan", akan dilakukan upaya:
   - jika memungkinkan perlu adanya kebijakan "pemangkasan" mekanisme/alur pelayanan.
   - diperlukan media yang lebih banyak dan tersebar guna memberikan informasi lengkap tentang pelayanan.
3. Pelatihan service excellent (pelayanan prima) diperuntukan bagi pelaksana layanan, guna mengoptimalkan sikap dan perilaku pelayanan, serta meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab pelaksana;
4. Mempedomani Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat dan Standar Pelayanan Publik (SPP) dalam memberikan pelayanan serta menindaklanjuti dengan Maklumat Pelayanan sebagai bentuk janji/komitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada pengguna layanan;
5. Terkait dengan "sarana dan prasarana":
   - jika sarana prasarana sudah cukup jumlahnya tetapi rusak (tidak layak), maka ada kemungkinan untuk diperbaiki/diganti;
   - jika sarana prasarana kurang cukup/kurang memadahi jumlahnya maka perlu ada langkah penambahan/pengadaan guna memenuhi kekurangannya.

6. Meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna layanan terhadap petugas dalam memberikan pelayanan.
7. Komitmen bersama yang kuat agar tidak ada lagi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang tidak melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat.

Grafik 3. 15
Trend Nilai SKM Kabupaten Buton Tahun 2022-2024



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab.Buton Tahun 2025

7) Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa

Pelayanan yang optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan wujud nyata dalam menciptakan pemerintahan yang baik (good governance). Pemberian pelayanan kepada masyarakat juga hasil kerja yang nyata dalam pemerintahan khususnya pemerintahan desa. Dengan demikian, dibutuhkan tata kelola yang baik dan benar sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang berkualitas. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab tak terlepas dari optimalnya pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, maka Pemkab.Buton menetapkan indikator beserta target kinerjanya sebagai berikut :

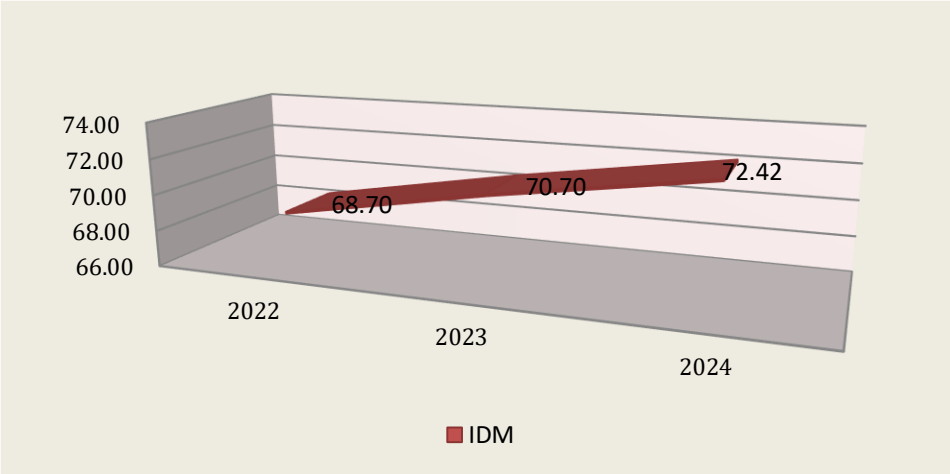
Tabel 3. 11
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
Persentase Indeks Desa Membangun (Berkembang)	%	83,13	72,42	87,11
Capaian Kinerja Sasaran Strategis				**87,11 (Berhasil)**

Sumber : BPM & Desa Kab.Buton Tahun 2025

- **Persentase Indeks Desa Membangun (Berkembang)** Kabupaten Buton pada tahun 2024 capaian kinerjanya sebesar 87,11%. Capaian ini diperoleh dengan cara membandingkan antara realisasi sebesar 72,42% dengan target kinerja sebesar 803,13%. Indeks desa membangun merupakan Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari 3 jenis indeks, yakni Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Indeks Desa Membangun dinilai dan dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui E-Book IDM yang dikeluarkan setiap tahunnya. Indeks Desa Membangun Kabupaten Buton menunjukan trend positif dalam kurun waktu 3 (tiga tahun terakhir). Pada tahun 2022 IDM Kabupaten Buton berada pada nilai 68,07, kemudian pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 70,70 dan pada tahun 2024 kembali meningkat di angka 72,42. Adanya peningkatan Indeks Desa Membangun karena adanya peningkatan status desa dari desa tertinggal menjadi desa berkembang, dan Desa berkembang menjadi Desa Maju tiap tahunnya.

Grafik 3. 16
Trend Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Buton
Tahun 2022-2024



Sumber : BPM & Desa Kabupaten Buton Tahun 2025

Guna meningkatkan capaian Indeks Desa membangun maka diperlukan adanya Pembinaan Desa Yang lebih terarah lagi baik dari segi administrasi,kelembagaan dan perencanaan, maupun dari segi penganggaran. Adapun hal lain yang dapat mendukung adalah Kolaborasi antar pemerintah desa yang baik, SDA dan SDM yang memadai secara optimal, Pemaksimalan potensi budaya lokal.

8) Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal

Kabupaten Buton memiliki kekhasan dan keunikan yang menjadi potensi yang bernilai ekonomi tinggi dengan memanfaatkan sumber-sumber kekayaan budaya lokal daerah. Melalui pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya lokal akan mampu merangsang tumbuhnya sektor pariwisata pada Kabupaten Buton. Aneka aset budaya dapat dikembangkan dengan maksimal sehingga akan mampu menarik kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya lokal memerlukan dukungan apresiasi masyarakat.

Guna mewujudkan masyarakat Buton yang menghargai nilainilai budaya dan bersatu dalam pembangunan melalui pelestarian budaya dan peningkatan pemahaman norma, tata nilai budaya Buton, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal. Sementara untuk mengukur sejauh mana capaian sasaran tersebut, maka ditetapkan indikator beserta targetnya sebagai berikut :

Tabel 3. 12
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Apresiasi Masyarakat Terhadap Budaya dan Kearifan Lokal

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
Persentase warisan budaya takbenda yang dilestarikan	%	62,65	100	166
Capaian Kinerja Sasaran Strategis				**166 (Sangat Berhasil)**

Sumber : Dinas Kebudayaan Kab.Buton Tahun 2025

- **Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan** pada tahun 2024 capaian kinerjanya sebesar 166 %. Capaian tersebut diperoleh dari realisasi sebesar 100% dibandingkan dengan target kinerja sebesar 60,24%. Realisasi sebesar 100% tersebut diperoleh dari jumlah warisan budaya takbenda (WBTB) yang dilestarikan sebanyak 10 (sepuluh) WBTB dibandingkan dengan jumlah warisan budaya takbenda yang ada di Kabupaten Buton yang juga sebanyak 10 (sepuluh) WBTB, dimana seluruh WBTB tersebut masih terus dilestarikan di semua desa yang berjumlah 83 Desa yang ada di Kabupaten Buton.

  Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda mendefinisikan warisan budaya takbenda sebagai praktik, representasi, ekspresi, serta pengetahuan dan keterampilan (termasuk instrumen, objek, artefak, ruang budaya), yang dikelompokkan, dikategorikan dalam beberapa kasus, individu mengakui sebagai bagian dari warisan budaya mereka. Kadang-kadang

disebut warisan budaya hidup, dan diwujudkan antara lain dalam domain berikut:

- Tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya takbenda;
- Seni Drama;
- Praktik sosial, ritual dan acara meriah;
- Pengetahuan dan praktik tentang alam dan alam semesta;
- Keahlian tradisional

Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan, di Kabupaten Buton terdapat 10 (Sepuluh) jenis warisan budaya takbenda yang dilestarikan, yaitu :

1. Manuskrip
2. Tradisi lisan (Pantun, Peribahasa, Teka-Teki)
3. Adat Istiadat
4. Ritus
5. Pengetahuan Tradisional (Kerajinan, Metode Penyehatan, Jamu Ramuan Tradisional, Makanan minuman)
6. Teknologi Tradisional (Alat Produksi, Senjata Tradisional)
7. Seni (Seni Tari, Seni Pertunjukan, Seni Musik, Seni Sastra, Lagu, Instrument Musik, Film, Seni Rupa)
8. Bahasa
9. Permainan Rakyat
10. Olahraga Tradisional

Namun dari kesepuluh jenis warisan budaya takbenda yang ada di kabupaten Buton, baru 2 (dua) warisan budaya takbenda dari jenis ritus yaitu **Dole-Dole** dan **Tandaki** yang telah memperoleh sertifikat dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Sementara untuk jenis warisan budaya takbenda lainnya masih dalam proses pengajuan untuk mendapatkan sertifikat.

9) Sasaran 9: Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum kehidupan sosial masyarakat

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah pada dasarnya akan terwujud jika di daerah dimaksud dapat tercipta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dimana di daerah itu terdapat keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melaksanakan pelbagai kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Keadaan dinamis seperti itu tentu hanya dimungkinkan apabila peraturan daerah maupun turunannya dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh komponen masyarakat daerah. Keadaan ini diharapkan mampu mendukung terciptanya iklim berinvestasi di Kabupaten Buton. Pemerintah daerah bersama dengan instansi vertikal (kepolisian dan kejaksaan) berupaya meningkatkan keamanan yang kondusif di masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir.

Untuk mengukur sejauhmana terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum kehidupan sosial masyarakat, maka ditetapkan indikator beserta target kinerja sebagai berikut :

Tabel 3. 13
Capaian Kinerja Sasaran Terciptanya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kehidupan Sosial Masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
Persentase penyelesaian tindak kejahatan	%	57,86	45,74	79,05
Persentase ormas aktif	%	100	52,63	52,63
Capaian Kinerja Sasaran Strategis				**65,84 (Berhasil)**

Sumber : Polres Buton Tahun 2025 dan Badan Kesbangpol Kab.Buton 2025

- **Persentase penyelesaian tindak kejahatan** di Kabupaten Buton pada tahun 2024 capaian kinerjanya sebesar 79,05%. Capaian tersebut diperoleh dari membandingkan realisasi penyelesaian kasus sebesar 45,74% dengan target kinerja sebesar tahun 2024 sebesar 57,86%. Berdasarkan data dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara Resor Buton menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 94 jumlah perkara tindak pidana dan yang diselesaikan sebanyak 43 kasus. Dari 94 jumlah perkara tindak pidana yang ditangani Polres Buton didominasi oleh Kasus Penganiyaan sebanyak 23 kasus. Tindak kejahatan pada tahun 2024. menujukkan penurunan perkara/kasus kriminal di wilayah hukum Polres Buton. Dimana pada tahun 2023 terdapat 180 kasus tindak pidana dan 162 kasus yang terselesaikan. Masih tingginya angka tindak kejahatan di Kabupaten Buton disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

  1. Faktor Ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang menurun dibanding tahun lalu, serta kesenjangan ekonomi yang semakin lebar membawa dampak munculnya aksi nekat pencurian dan penipuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.
  2. Faktor Sosial, perkembangan tehnologi dan informasi saat ini membawa dampak sosial pada kehidupan masyarakat. Meningkatnya kasus narkoba, perubahan gaya hidup anak muda saat ini, jika tidak dapat dikontrol akan membawa ke arah pergaulan yang salah dan terjerat pada penggunaan narkoba maupun minuman keras. Kasus klitih merupakan salah satu kasus yang masuk dalam kategori penganiayaan.
  3. Kurang maksimalnya sanksi hukum bagi pelaku kriminalitas, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku
  4. Khusus perkara gangguan Kamtibmas sebagian besar karena pengaruh minuman keras.

  Solusi yang dilakukan untuk meminimalisir tindak kejahatan diantaranya :

1. Memberdayakan dan meningkatkan peran anggota Linmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan nendudukkan linmas sebagai perangkat deteksi dini ketentraman dan ketertiban di daerah.
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam menangani kasus yang terjadi.
3. Revitalisasi terhadap paradigma ketentraman dan ketertiban umum disemua tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah desa.
4. Komitmen pemerintah terhadap upaya penegakan Hukum dan Peraturan Daerah Komitmen yang jelas dan diikuti pembiayaan di semua tingkatan pemerintahan terhadap urgensi upaya penegakan Hukum dan Peraturan Daerah.

Khusus untuk tindak kejahatan akibat konsumsi alcohol, Pemerintah Kabupaten Buton telah mengambil langkah langkah terkait hal tersebut dengan menginisiasi kampung bebas minuman beralkohol di tujuh desa yakni Wabula I, Wabula, Wasuemba, Holimombo, Koholimombono, Wasampela, dan desa Bajo Bahari Kecamatan Wabula Kabupaten Buton setelah pada tahun sebelumnya desa Dongkala dan Kondowa Kecamatan Pasarwajo juga telah mendekalarasikan sikap kampung bebas Miras. Keberadaan Minuman Keras (Miras) di Kabupaten Buton cukup memprihatinkan, pasalnya daerah ini dikenal sebagai tempat produksi minuman beralkohol tradisonal dan tidak jarang dipasok hingga ke Kota dan Kabupaten terdekat. Kampung bebas miras tidak asal dibentuk, namun didalamnya terdapat sebuah kesepakatan oleh para tokoh adat dan agama serta masyarakat yang melahirkan sebuah regulasi berupa denda maupun sanksi sosial. Penurunan angka kriminalitas tersebut tidak terlepas dari upaya yang terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Forkopimda, dan masyarakat yang terus bersinergi dan berkolaborasi dalam menjaga Kamtimbas di wilayah Kabupaten Buton. Selain itu pula,

dalam upaya menjaga kerukunan antar umat beragama, pemerintah daerah juga bersinergi dengan forum-forum keagamaan seperti FKUB, MUI, dan membentuk tim penanganan konflik sosial daerah serta mendirikan rumah Tahfiz Alquran dan melaunching Desa Toleransi di Kecamatan Lasalimu Selatan.

Tabel 3. 14
Data Tindak Pidana di Kabupaten Buton

No.	Tahun Perkara	Jumlah Perkara	Jumlah Yang Diselesaikan
1.	2022	226 kasus	203 kasus
2.	2023	180 kasus	162 kasus
3.	2024	94 kasus	43 Kasus

Sumber data : Satreskrim Polres Buton Tahun 2025

- **Persentase ormas aktif** di Kabupaten Buton pada tahun 2024 capaian kinerjanya sebesar 52,63%. Capaian tersebut diperoleh dari realisasi sebesar 52,63% dibandingkan dengan target kinerja sebesar 100%. Realisasi persentase ormas aktif diperoleh dari data Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kabupaten Buton, dimana pada tahun 2024 terdapat 38 Ormas namun yang aktif hanya tersisa 20 organisasi masyarakat.

  Organisasi masyarakat terdiri dari 2 yaitu ormas berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Ormas berbadan hukum dikatakan aktif setelah mendapatkan SK Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Kemenkumham, yang berlaku seumur hidup. Sementara Ormas tidak berbadan hukum hanya memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Kemendagri. SKT berlaku selama 5 tahun. Apabila setelah 5 tahun Ormas tersebut tidak memperpanjang SKT maka ormas tsb dikatakan tidak aktif. Di Kabupaten Buton terdapat 24 (Dua Puluh Empat) Ormas berbadan hukum dan 14 (empat belas) Ormas tidak berbadan hukum. Namun dari 24 (Dua Puluh Empat)

Ormas berbadan hukum tersebut hanya 20 (dua puluh) ormas yang memiliki SK Penetapan dari Kemenkumham RI.

10) Sasaran 10 : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata

Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat. Penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas dan memadai, akan mendorong pergerakan sektor-sektor perekonomian lainnya. Kondisi infrastruktur dasar yang ada hingga saat ini,dipandang masih belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Buton, dan masih perlu dilakukan perbaikan dan pembenahan terhadap infrastruktur tersebut.

Salah satu infrastruktur dasar yang harus dipenuhi dalam rangka meningkatkan aktivitas dalam segala bidang adalah infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan konektivitas wilayah. Dengan infrastruktur dan aksesibilitas yang berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendukung konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi.

Guna mengukur sejauhmana ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata di Kabupaten Buton, maka ditetapkan indikator berikut :

Tabel 3. 15
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Apresiasi Masyarakat Terhadap Budaya dan Kearifan Lokal

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
Indeks infrastrukur wilayah	%	**30,48**	**29,26**	**95,99**
Capaian Kinerja Sasaran Strategis				**95,99 (Sangat Berhasil)**

Sumber : Dinas PUPR Kab.Buton Tahun 2025

- **Indeks infrastrukur wilayah**

  Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan menjangkau seluruh wilayah memiliki peran yang vital dalam mendukung aktivitas masyarakat, mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi (PUPR, 2021). Lebih lanjut ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkualitas tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan daya saing suatu wilayah. Oleh karena itu dibutuhkan perencanaan infrastruktur yang tepat untuk mendukung perkembangan wilayah.

  Indeks infrastrukur wilayah Kabupaten Buton pada tahun 2024 **capaian kinerjanya sebesar 95,99%**. Capaian tersebut diperoleh dengan membandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 29,26 dengan target kinerja sebesar 30,48. Indeks infrastruktur diperoleh dari panjang jalan Kabupaten Buton pada tahun 2024 sebesar 482,27 dibagi Luas wilayah administrasi yang dilayani sebesar 1.648,04 dikali 100. Menurunnya capaian kinerja dari tahun 2023 dikarenakan meningkatnya target kinerja namun panjang jalan Kabupaten Buton tidak mengalami perubahan/penambahan di tahun 2024.

11) Sasaran 11 : Meningkatnya ketersediaan energi listrik

Ketersedian energi istrik merupakan salah satu keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan sektor perekonomian. Ketersediaan energi listrik yang memadai dan tepat sasaran akan memacu perkembangan pembangunan daerah seperti sektor industri, bisnis, pelayanan publik dan bahkan kualitas hidup masyarakat dengan semakin banyaknya warga yang menikmati energi listrik. Kemudian secara langsung maupun tidak langsung, hal itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan peningkatan kebutuhan energi listrik pada suatu wilayah maka dibutuhkan perencanaan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di waktu mendatang dan upaya penghematan energi listrik. Untuk

mengukur sejauh mana ketersediaan energy listrik di Kabupaten Buton, maka ditetapkan indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel 3. 16
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Energi Listrik

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
Rasio Elektrifikasi	%	**94**	**98,01**	**104,26**
Rata-rata capaian				**104,24 (Sangat Berhasil)**

Sumber Data : PLN ULP Pasarwajo

- **Rasio Elektrifikasi** Kabupaten Buton Capaian kinerjanya pada tahun 2024 mencapai 104,26%. Capaian tersebut diperoleh dengan membandingkan realisasi sebesar 98,01 dengan target kinerja pada tahun 2024 sebesar 94%. Rasio elektrifikasi itu sendiri diperoleh dari perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga.
  Pada Tahun 2024 jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN di Kabupaten Buton sebanyak 19.239 Rumah Tangga sementara jumlah total rumah tangga se-Kabupaten Buton sebanyak 19.629 RT, sehingga didapatkan rasio eletrifikasi sebesar 98,01. Namun jumlah Rumah Tangga di atas merupakan Rumah Tangga yang berada dalam wilayah kerja ULP Pasarwajo yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan yakni, Pasarwajo, Wabula, Wolowo, Siotapina, Lasalimu dan Lasalimu Selatan. Sementara untuk Kecamatan Kapontori berada pada wilayah kerja ULP Baubau. Berikut daftar Jumlah Rumah Tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN :

Tabel 3. 17
Jumlah RT Berlistrik PLN dan Non PLN

WILAYAH KERJA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	JUMLAH RT THN 2024	JUMLAH RT BERLISTRIK PLN	JUMLAH RT BERLISTRIK NON PLN	JUMLAH RT BELUM BERLISTRIK
ULP PASARWAJO	PASAR WAJO	Waangu-Angu	221	215	0	0
ULP PASARWAJO	PASAR WAJO	Warinta	289	226	63	0
ULP PASARWAJO	PASAR WAJO	Lapodi	384	359	0	25
ULP PASARWAJO	PASAR WAJO	Wakoko	552	544	8	0
ULP PASARWAJO	PASAR WAJO	Wasaga	265	262	0	3
ULP PASARWAJO	PASAR WAJO	Kancinaa	155	152	0	3
ULP PASARWAJO	PASAR WAJO	Winning	338	289	49	0
ULP PASARWAJO	PASAR WAJO	Holimombo Jaya	248	238	10	0
ULP PASARWAJO	PASAR WAJO	Kondowa	526	494	26	6
ULP PASARWAJO	PASAR WAJO	Dongkala	419	419	0	0
ULP PASARWAJO	PASAR WAJO	Holimombo	221	221	0	0
ULP PASARWAJO	PASAR WAJO	Kombeli	664	594	70	0

WILAYAH KERJA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	JUMLAH RT THN 2024	JUMLAH RT BERLISTRIK PLN	JUMLAH RT BERLISTRIK NON PLN	JUMLAH RT BELUM BERLISTRIK
ULP PASARWAJO	PASAR WAJO	Takimpo	410	374	36	0
ULP PASARWAJO	PASAR WAJO	Awainulu	270	240	30	0
ULP PASARWAJO	PASAR WAJO	Laburunci	462	462	0	0
ULP PASARWAJO	PASAR WAJO	Banabungi	552	536	16	0
ULP PASARWAJO	PASAR WAJO	Kambulabulana	496	496	0	0
ULP PASARWAJO	PASAR WAJO	Pasarwajo	737	714	23	0
ULP PASARWAJO	PASAR WAJO	Saragi	355	355	0	0
ULP PASARWAJO	PASAR WAJO	Kawabaloke	196	181	0	15
ULP PASARWAJO	PASAR WAJO	Mantowu	150	150	0	0
ULP PASARWAJO	PASAR WAJO	Kaongkeongkea	170	170	0	0
ULP PASARWAJO	LASALIMU	Lawele	317	301	16	0
ULP PASARWAJO	LASALIMU	Suandala	123	123	0	0
ULP PASARWAJO	LASALIMU	Kamaru	336	336	0	0

WILAYAH KERJA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	JUMLAH RT THN 2024	JUMLAH RT BERLISTRIK PLN	JUMLAH RT BERLISTRIK NON PLN	JUMLAH RT BELUM BERLISTRIK
ULP PASARWAJO	LASALIMU	Lasembangi	140	140	0	0
ULP PASARWAJO	LASALIMU	Bonelalo	155	155	0	0
ULP PASARWAJO	LASALIMU	Wasuamba	204	204	0	0
ULP PASARWAJO	LASALIMU	Sribatara	204	202	0	2
ULP PASARWAJO	LASALIMU	Togomangura	188	188	0	0
ULP PASARWAJO	LASALIMU	Wasambaa	308	308	0	0
ULP PASARWAJO	LASALIMU	Benteng	113	73	40	0
ULP PASARWAJO	LASALIMU	Talaga Baru	281	264	0	17
ULP PASARWAJO	LASALIMU	Nambo	207	207	0	0
ULP PASARWAJO	LASALIMU SELATAN	Ambuau Indah	405	368	0	37
ULP PASARWAJO	LASALIMU SELATAN	Kinapani Makmur	206	187	19	0
ULP PASARWAJO	LASALIMU SELATAN	Mopaano	147	147	0	0
ULP PASARWAJO	LASALIMU SELATAN	Umalaoge	284	264	0	20

WILAYAH KERJA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	JUMLAH RT THN 2024	JUMLAH RT BERLISTRIK PLN	JUMLAH RT BERLISTRIK NON PLN	JUMLAH RT BELUM BERLISTRIK
ULP PASARWAJO	LASALIMU SELATAN	Lasalimu	554	547	7	0
ULP PASARWAJO	LASALIMU SELATAN	Wajah Jaya	332	332	0	0
ULP PASARWAJO	LASALIMU SELATAN	Siontapina	100	99	1	0
ULP PASARWAJO	LASALIMU SELATAN	Siomanuru	186	186	0	0
ULP PASARWAJO	LASALIMU SELATAN	Mulya Jaya	262	241	5	16
ULP PASARWAJO	LASALIMU SELATAN	Harapan Jaya	131	131	0	0
ULP PASARWAJO	LASALIMU SELATAN	Sangia Arano	59	52	7	0
ULP PASARWAJO	LASALIMU SELATAN	Mega Bahari	131	128	3	0
ULP PASARWAJO	LASALIMU SELATAN	Sumber Agung	48	45	3	0
ULP PASARWAJO	LASALIMU SELATAN	Rejo Sari	210	166	0	44
ULP PASARWAJO	LASALIMU SELATAN	Ambuau Togo	288	264	24	0
ULP PASARWAJO	LASALIMU SELATAN	Balimu	137	108	13	16
ULP PASARWAJO	SIOTAPINA	Walompo	206	143	63	0

WILAYAH KERJA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	JUMLAH RT THN 2024	JUMLAH RT BERLISTRIK PLN	JUMLAH RT BERLISTRIK NON PLN	JUMLAH RT BELUM BERLISTRIK
ULP PASARWAJO	SIOTAPINA	Matanauwe	320	319	0	1
ULP PASARWAJO	SIOTAPINA	Sampuabalo	409	409	0	0
ULP PASARWAJO	SIOTAPINA	Kuraa	145	140	0	5
ULP PASARWAJO	SIOTAPINA	Kumbewaha	500	454	0	46
ULP PASARWAJO	SIOTAPINA	Sumber Sari	410	400	10	0
ULP PASARWAJO	SIOTAPINA	Labuandiri	203	195	8	0
ULP PASARWAJO	SIOTAPINA	Karya Jaya	178	174	0	4
ULP PASARWAJO	SIOTAPINA	Manuru	409	322	77	10
ULP PASARWAJO	SIOTAPINA	Gunung Jaya	197	141	56	0
ULP PASARWAJO	SIOTAPINA	Bahari Makmur	124	124	0	0
ULP PASARWAJO	WOLOWA	Kaumbu	161	120	41	0
ULP PASARWAJO	WOLOWA	Wolowa	219	217	0	2

WILAYAH KERJA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	JUMLAH RT THN 2024	JUMLAH RT BERLISTRIK PLN	JUMLAH RT BERLISTRIK NON PLN	JUMLAH RT BELUM BERLISTRIK
ULP PASARWAJO	WOLOWA	Matawia	244	213	0	31
ULP PASARWAJO	WOLOWA	Wolowa Baru	180	180	0	0
ULP PASARWAJO	WOLOWA	Suka Maju	69	5	64	0
ULP PASARWAJO	WOLOWA	Bungi	135	132	0	3
ULP PASARWAJO	WOLOWA	Galanti	186	150	36	0
ULP PASARWAJO	WABULA	Wasuemba	159	154	0	5
ULP PASARWAJO	WABULA	Wabula	206	206	0	0
ULP PASARWAJO	WABULA	Wasampela	207	197	0	10
ULP PASARWAJO	WABULA	Holimombo1	145	145	0	0
ULP PASARWAJO	WABULA	Koholimombona	78	78	0	0
ULP PASARWAJO	WABULA	Wabula Satu	273	273	0	0
ULP PASARWAJO	WABULA	Bajo Bahari	132	95	37	0

Sumber Data : PLN ULP Pasarwajo Tahun 20

C. Akuntabilitas Keuangan

APBD Kabupaten Buton pada tahun 2024 untuk anggaran pendapatan sebesar Rp. **850.097.602.008,00** dan belanja sebesar Rp. **828.185.573.543,00** sehingga terdapat surplus/defisit anggaran sebesar Rp. 21.912.028.465,00 yang ditutup dengan pos pembiayaan yang berasal dari sisa lebih perhitungan tahun lalu (Silpa). Sedangkan realisasi APBD Kabupaten Buton TA 2024 untuk pendapatan sebesar Rp. 844.846.382.964,13 dan realisasi belanja Rp 773.025.735.849,999. Berikut rincian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun 2024:

Tabel 3. 18
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2024

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
4	**PENDAPATAN**	**850.097.602.008,00**	**844.846.382.964,13**	**(5.251.219.043,87)**	**99,38**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	42.203.730.687,00	23.998.375.641,13	18.205.355.045,87	56,86
4.1.1	Pajak Daerah	49.200.000,00	45.846.541,76	(335.345.824,00)	93,18
4.1.2	Retribusi Daerah	2.525.000.000,00	3.100.058.482,00	(575.058.482,00)	122,77
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.061.730.687,00	13.024.730.687,00	(37.000.000,00)	99,72
4.1.4	Lain-kain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	21.697.000.000,00	3.288.932.296,13	18.408.067.703,87)	15,16
4.2	**DANA PERIMBANGAN**	**800.893.871.321,00**	**790.786.695.023**	**10.125.176.298,00**	**98,74**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	772.953.075.638,00	768.996.067.229,00	(3.975.008.409,00)	99,49
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.940.795.683,00	21.790.627.794,00	(6.150.167.889,00)	77,99

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
4.3	**LAIN- LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**7.000.000.000,00**	**30.061.312.300,00**	**23.061.312.300,00**	**429,45**
4.3.1	Pendapatan Hibah	0.00	21.117.637.000,00	21.117.637.000,00	0,00
4.3.2	Lain- Lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perudang- Undangan	7.000.000.000,00	8.943.675.300,00	1.943.675.300,00	127,77
5	**BELANJA DAERAH**	**828.185.573.543,00**	**773.025.735.849,99**	**(55.159.837.693,00)**	**93,34**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**561.438.958.089,00**	**520.110.739.394,999**	**41.328.218.694,0006**	**92,64**
5.1.1	Belanja Pegawai	341.449.010.484,00	336.114.246.342,999	(5.334.764.141,00061)	92,64
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	184.558.865.960,00	148.669.589.963,00	(35.889.275.997,00)	80,55
5.1.3	Belanja Bunga	3.407.663.493,00	3.310.833.712,00	(96.829.781,00)	97,16
5.1.4	Belanja Sosial	32.001.494.152,00	32.001.494.152,00	0,00	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	21.924.000,00	14.575.225,00	(7.348.775,00)	66,48
5.2	**BELANJA MODAL**	**153.364.725.830,00**	**140.918.461.023,00**	**12.446.264.807,00**	**91,88**
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	21.170.086.880,00	22.260.598.094,00	1.090.511.214,00	105,15
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	91.668.057.400,00	79.622.840.009,00	(12.045.217.391,00)	86,86
5.2.4	Belanja Jaringan dan Irigasi	39.153.731.550,00	38.013.245.920,00	(1.140.485.630,00)	97,09
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	637.850.000,00	288.427.000,00	(349.423.000,00)	45,22
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**200.313.424,00**	**0.00**	**(0.00)**	**0,00**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	200.313.424,00	0.00	(0.00)	0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**113.181.576.200,00**	**11.996.535.431,00**	**(1.185.040.768,00)**	**98,95**
5.4.1	Belanja Bantuan Keuangan	113.181.576.200,00	11.996.535.431,00	(1.185.040.768,00)	98,95
	SURPULUS/DEFISIT	21.912.028.465,00	71.820.647.114,13	49.908.618.649,13	327,77
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**33.294.003.067,00**	**33.294.003.067,00**	**0**	**100**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya	**33.294.003.067,00**	**33.294.003.067,00**	**0**	**100**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**55.206.031.532,00**	**54.406.031.533,00**	**(799.999.999,00)**	**98,55**
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	55.206.031.532,00	54.406.031.533,00	(799.999.999,00)	98,55
	PEMBIAYAAN NETTO	**(21.912.028.465,00)**	**(21.112.028.464,16)**	**800.000.000,00**	**96,35**
	SISA LEBIH/ KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAN	**0,00**	**50.708.618.649,97**	**50.708.618.649,97**	**0,00**

Sumber : BKAD Kab.Buton Tahun 2025

`

- **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus: Persentase efisiensi Biaya =100% - [$\frac{Realisasi\ Biaya}{Target\ Biaya}$ x 100%]

Secara keseluruhan di Tahun 2024 target dan realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Buton adalah sebagai berikut :

Anggaran	Rp. 828.185.573.543,00
Realisasi	Rp. 773.025.735.849,99
Selisih kurang	Rp.(55.159.837.693,00)

Realisasi belanja sebesar 93,34% atau kurang belanja sebesar 6,66% Anggaran Belanja Tahun 2024. Berdasarkan data tersebut terdapat Efisiensi belanja daerah pada tahun 2024 sebesar 6,66% dari total anggaran belanja daerah yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Sementara untuk Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan, pengunaan tenaga ahli dari perguruan tinggi sebagai pemateri, tim penilai, pemberi masukan, dan kerjasama dengan pihak swasta .

BAB IV
PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2024, disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Buton memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 11 (sebelas) sasaran strategis, 27 (Dua Puluh Tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Buton tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2023 – 2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 27 indikator kinerja utama Bupati tahun 2024, disimpulkan bahwa terdapat 17 (Tujuh Belas) capaian indikator sasaran atau sebanyak 62,96% masuk dalam kategori Sangat Tinggi, 5 (Lima) Indikator sasaran atau sebesar 18,51% masuk dalam kategori tinggi, 1 (satu) Indikator sasaran atau sebesar 3,70% masuk dalam kategori sedang, namun ada 1 (satu) indikator sasaran atau 3,70% yang masuk dalam kategori rendah, bahkan ada 3 (tiga) indikator sasaran atau 11,11% masuk kriteria sangat rendah.

Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja utama yang capaiannya belum seperti yang diharapkan sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPD Kabupaten Buton Tahun 2023 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, menjadi bahan refleksi sebagai motivasi untuk berusaha lebih keras dan lebih baik lagi.